

ISSN 1080-4009

# Dahlia

Journal of the International Dahlia Society

Volume 41, Number 1, February 2014

## 2014 Dahlia Show SCHEDULE



For more information on the Society, visit our website at [www.dahlia.org](http://www.dahlia.org)  
For more information on the Society, visit our website at [www.dahlia.org](http://www.dahlia.org)  
For more information on the Society, visit our website at [www.dahlia.org](http://www.dahlia.org)

**Pembaca yang kami hormati,**

**Sebuah** kelahiran senantiasa selalu diiringi harapan. Sebuah kelahiran adalah anugerah yang harus disyukuri. Kini, alhamdulillah, **Swara RAHIMA** edisi perdana telah hadir di tangan anda. Sesuai dengan namanya kami ingin mengikhtiarkan media ini sebagai media 'kasih sayang'. Media silaturahmi antar kita semua untuk berbagi kebaikan dalam rangka menegakkan hak-hak perempuan. Dengan demikian, insya Allah, media ini akan menjadi titian untuk merealisasikan cita kemanusiaan yang hakiki. Kami sadar, semua itu tidak semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi kelahiran Rahima di tengah gempuran situasi 'konflik' yang lagi marak di negeri ini justru menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja dalam semangat kasih sayang. Dan sudah tentu 'concern' para pembaca merupakan 'rabuk' yang dapat menyemainya.

**Pembaca yang budiman,**

Indonesia kini tengah bergolak. Ada krisis politik, ekonomi dan sosial budaya yang berkepanjangan. Peristiwa demi peristiwa yang mengerikan dan tak pernah di sangka-sangka muncul satu demi satu. Ironisnya semua itu menjamur ketika kran kebebasan mulai terbuka. Ketika masyarakat tengah berupaya mengungkapkan diri untuk merealisasikan segenap harapan mereka akan sebuah dunia yang lebih baik, setelah lebih dari tiga dasawarsa hidup dalam situasi tertekan.

Saat ini, di tengah gelombang harapan itu, teror, pembunuhan dan penyiksaan justru merebak dimana mana. Kekerasan semakin tampak nyata dan intensif. Terbuka bahkan sangat vulgar. Dan sayangnya, berbagai ekspresi kekerasan itu seringkali dikaitkan dengan agama. Politisasi agama dengan sangat terampil mengemas dua isu sensitif, perempuan dan agama. Ambil contoh ekspose media masa. Begitu penuh emosi. Ada 'sweeping' terhadap para pekerja seks, perkosaan dan rajam, aborsi, cadar, jilbab, penggundulan

rambut, sampai pro kontra presiden perempuan atau perkawinan (lintas agama). Seringkali tema tema itu dikemas dengan sentimen agama yang tinggi. Hal ini pada gilirannya bisa dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai 'bahan bakar' untuk memperkeruh situasi.

Di saat-saat seperti inilah, siapapun kita, termasuk kaum perempuan sudah selayaknya 'bertafakkur' sejenak. Mengkaji ulang apa yang terjadi, sebagai bekal untuk melakukan sebuah tindakan yang bertanggung jawab lagi arif di masa datang. Karena sebagai bagian dari bangsa ini kita tidak boleh bersikap reaktif terus menerus, kebingungan atau malahan tinggal diam.

Dalam semangat itulah, di edisi perdana ini **Swara RAHIMA** mengajak para pembaca untuk berefleksi di seputar sebuah tema besar yakni gerakan perempuan Islam. Sebagai sebuah langkah awal, kami sama sekali tidak berpretensi mengungkap seluruh kisi gerakan ini. Namun kami berupaya sedapat mungkin untuk dapat menghadirkan sebuah sajian yang memberi gambaran akan sosok dan dinamika gerakan yang tengah terjadi. Semoga kita semua dapat membacanya secara jujur dan kritis. Karena hanya dengan kejujuran dan kejujuran, hikmah dapat kita petik dari setiap kejadian.

**Pembaca yang berbahagia,**

Akhirnya, kami selalu mengharapkan saran dan kritik para pembaca guna perbaikan **Swara RAHIMA** di hari-hari mendatang. Untuk itu, keluarga besar Rahima mengharap restu para pembaca, agar kerja yang kami lakukan akan lancar dan penuh rahmat bagi kita semua. Khususnya bagi kaum perempuan yang sampai saat ini banyak dari hak-hak dasar mereka masih belum diakui.

Semoga Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, selalu memberkati upaya kita semua. Amin.

Wassalam,

**Redaksi**

## Rahima

Jl. Pancoran Timur IIA No. 10 Perdatam  
Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp./Fax. 021-7984165  
Email:rahima2000@cbn.net.id

**Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab :** KH. Hussein Muhammad

**Pemimpin Redaksi :** Farha Ciciek **Dewan Redaksi :** Wahyu Budi Santoso, A.Dewi Eridani, Syafiq Hasyim (non aktif), AD. Kusumaningtyas, Dwi Rubiyanti, Helmy Ali **Redaktur Pelaksana :** Nefisra Viviani **Editor Tamu :** Ully Siregar **Dewan Ahli :** Prof.Dr. Azyumardi Azra, Prof.Dr. Saporinah Sadli, KH. Muhyiddin Abdussomad, Nyai. Hj. Nafisah Sahal, Dr. Mansour Faqih, Dr.

Kamala Chandra Kirana **Ilustrasi :** Mufidz Aziz **Disain Grafis :** Maman A. Rahman **Pusdok :** Widaningrum **Keuangan :** M. Syafran **Distribusi :** Imam Siswoko, Sanim **Jaringan :** Emma Marhumah (Yogyakarta), Djudju Zubaidah (Tasikmalaya), Faqihuddin Abdul Qodir MA (Cirebon), Ruqayyah (Bondowoso), Kholillah Mawardi (Jepara), Hindun (Mataram), Zohra A. Baso (Makasar).

**SWARA RAHIMA** adalah majalah berkala kerjasama Yayasan RAHIMA dengan The Ford Foundation untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam, gender dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA mengharapkan partisipasi melalui saran dan kritik. SWARA RAHIMA juga menanti kiriman tulisan dari pembaca, bagi yang dimuat diberi imbalan ala kadarnya.

# Sekilas Rahima

**A**walnya Rahima merupakan sebuah divisi bernama **Afiah an-Nisa (FN)** yang bernaung di bawah **Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)**. Rekan kerja FN yang utama selama masa kerja enam tahun (sejak 1994 sampai 2000) adalah pesantren, lembaga keagamaan tradisional yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Indonesia.

Keputusan untuk mengembangkan FN dari divisi sebuah organisasi menjadi sebuah lembaga yang independen terutama dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat akan sebuah institusi yang berfokus penuh pada isu perempuan dan Islam.

Ke depan, di samping melanjutkan kerjasama dengan komunitas pesantren, Rahima akan memperluas lingkup aktifitas maupun jaringan dengan kelompok dan organisasi non-pesantren seperti, organisasi perempuan, organisasi mahasiswa, organisasi agama, kelompok studi dan LSM.

Keterlibatan Rahima yang dibutuhkan berbagai kelompok dan organisasi tersebut untuk mengembangkan wacana keislaman yang lebih pro perempuan. Hal itu dilakukan guna mempermudah kerja pemberdayaan rakyat yang mereka upayakan.

## TUJUAN

Rahima bertujuan mendorong terciptanya suatu diskursus baru di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat Islam yang lebih menggaris bawahi prinsip-prinsip keadilan bagi kaum perempuan melalui penegakan hak-hak mereka sebagai prasyarat terwujudnya demokratisasi dalam masyarakat.



## KEGIATAN

Untuk kerja ke depan Rahima akan berfokus pada beberapa kegiatan yang dilakukan di dua tataran yakni komunitas Pesantren dan Masyarakat.

**Di Komunitas pesantren** program kerja akan mengarah pada penataan dan pengelolaan pesantren yang berkesetaraan gender. Untuk itu strategi yang dilaksanakan adalah merancang ulang dan mensosialisasikan sistem pengajaran pesantren yang sensitif gender. Adapun kegiatan yang dikembangkan antara lain pelatihan gender dan hak-hak perempuan, diskusi tematik tentang berbagai isu perempuan (*Halqah*) dan pasok informasi. Masih dalam lingkup pesantren, Rahima juga akan berikhtiar untuk meningkatkan kesadaran gender dan hak-hak perempuan pada rekan kerja pesantren seperti pimpinan majelis taklim dan mubaligh - mubalighah. Posisi strategis mereka sebagai pemuka agama dapat menjadi pendorong bagi berkembangnya pemberdayaan perempuan di dalam masyarakat.

**Di lingkup masyarakat**, Rahima akan bekerja untuk menyebar luaskan wacana keagamaan yang berperspektif gender melalui berbagai forum publik. Adapun kegiatannya berupa dialog, seminar, diskusi berkala, lokakarya dan lain-lain. Rahima juga menerbitkan berbagai bentuk publikasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Selain itu disediakan juga tayangan *website* yang beralamat di <http://www.rahima.or.id> dan layanan perpustakaan mengenai Islam dan berbagai isu perempuan. Perpustakaan ini dibuka untuk umum dari jam 09.00 – 16.00 Wib bertempat di Jl. Pancoran Timur IIA No.10 Perdatam Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp/Faks. 021-798 4165

## KRU RAHIMA

**Dewan Direktur** : Hussein Muhammad, Farha Ciciek, Syafiq Hasyim, **Sekretaris Eksekutif** : AD Eridani, **Koord. Info. & Dok.** : Nefisra Viviani, **Koord. Pelatihan** : AD Kusumaningtyas, **Ka.Keu** : Kusnaedi, **Staf** : Dwi Rubiyanti K., Widaningrum, Maman A. Rahman, Imam Siswoko, M.Syafran, Sanim

## DAFTAR ISI

<b>Fokus</b>	4
Sketsa Gerakan Perempuan Islam Indonesia	
<b>Opini</b>	12
Wacana Gender Dalam Gerakan Perempuan....	
Wawancara Dengan Budi M.Rahman	
<b>Agama</b>	16
Perjuangan Perempuan di Masa Rasulullah.....	
Oleh: Badriyah Fayumi	
<b>Teropong Dunia</b>	19
Ketika Perempuan Iran Merambah Wilayah Sakral	
<b>Refleksi</b>	27
Gerakan Perempuan Islam untuk Cita Kemanusiaan	

## Sketsa Gerakan Perempuan Islam Indonesia “MENGUKIR SEJARAH BARU”

**“Perempuan selalu menjadi sahabat agama, tapi umumnya agama bukan sahabat bagi perempuan,” ucapan indologis Jerman, *Morin Winterniz*, sering dikutip ketika orang bicara tentang perempuan dalam lingkup agama, termasuk Islam. Revolusi Islam Iran dan proyek Islamisasi di Pakistan adalah ilustrasi yang sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana perempuan menjadi objek utama pelaksanaan syari’at Islam dan sasaran kontrol untuk mewujudkan sistem sosial yang diidealkan. Pendapat yang sama terjadi ketika orang mengamati pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Berita-berita di media massa mengungkapkan bagaimana perempuan di Aceh digunduli dan dituduh sebagai ‘perempuan tidak baik’ bila tidak menggunakan jilbab.**

Penggambaran diatas hanyalah satu sisi dari realitas dunia Islam. Di bagian lain, Islam ditampilkan dengan wajah lebih damai seperti yang ditemukan di Turki, Mesir dan beberapa negara di kawasan Asia. Perempuan lebih bebas menjalankan aturan-aturan agama dan menentukan sikap mereka. Tapi, bukan berarti tak ada masalah. Tumbuh kembangnya gerakan perempuan Islam di negara-negara tersebut mengindikasikan adanya sesuatu yang tak beres dalam dunia mereka. Pergerakan perempuan di dunia Islam membuktikan bahwa realitas ketidakadilan terhadap mereka bisa muncul dalam beragam penampilan agama.

Meski ide normatif Islam membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, realitas sering menunjukkan hal sebaliknya. Agama sering tampil dalam pandangan dunia laki-laki yang meletakkan perempuan sebagai objek. Pemaksaan syari’at Islam terhadap perempuan sering ditemukan pada masyarakat Islam yang ‘militan’. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan hak-haknya, bahkan yang menyangkut persoalan mereka sendiri.

Padahal dalam masa Nabi Muhammad Saw – yang merupakan masa ideal Islam – perempuan mempunyai ruang lebih dalam menunjukkan keterlibatan dalam dunia sosialnya. Mereka terlibat aktif dalam memformulasikan nilai-nilai agama. Tak ada kaidah-kaidah agama, terutama yang berhubungan dengan mereka yang ‘diputuskan’ tanpa dialog dengan mereka. Di masa *tabi’in* dan *tabiit-tabi’in*, peneliti Islam kontemporer menemukan banyak fakta tercecer tentang beberapa ilmuwan perempuan yang menjadi guru bagi pendiri mazhab besar Islam. Rumah mereka menjadi sumber bagi perkembangan tradisi keilmuan Islam saat itu. Sejarah juga tak bisa memungkiri kecemerlangan beberapa ratu dalam pemerintahan Islam abad pertengahan.

Berbagai prestasi diatas, sayangnya telah diabaikan dalam catatan sejarah. Sejarah androsentris juga melupakan arti penting gerakan perempuan dalam pembebasan masyarakat Islam dari pemerintahan kolonial seperti yang terjadi di Turki, India dan Indonesia. Selain melakukan perlawanan terhadap intervensi asing di tanah airnya, perempuan juga memberi kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan syari’at Islam dalam masyarakatnya. *Taufik Abdullah* menceritakan masa kecilnya di Sumatera Barat, ketika ia menyaksikan perempuan-perempuan berjilbab berpatroli di kedai-kedai kopi dan pasar untuk mencari laki-laki muslim yang tidak melakukan shalat Jum’at. Perempuan yang bergabung di bawah kelompok ‘lasykar jihad’ tersebut juga membuat gentar orang-orang yang melakukan praktek judi, minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syari’at Islam lainnya. Sekarang, hal yang sama terjadi di Aceh. Perempuan tidak hanya menjadi objek dan sasaran kontrol pelaksanaan syari’at Islam. Dengan gagah berani mereka melakukan hal yang sama terhadap laki-laki yang tidak konsisten melaksanakan konvensi-konvensi sosial yang disepakati bersama.

Berbagai fenomena di atas mendorong keharusan untuk melakukan analisis baru tentang peranan gerakan perempuan dalam dunia Islam. Untuk kasus Indonesia, munculnya berbagai bentuk dan model gerakan mereka tidak bisa dilepaskan dari pola pergerakan sebelumnya. Berbagai kelompok atau jaringan baru yang dibangun tak lepas dari kritik terhadap ketidakadilan sejarah maupun realitas baru di dunia internasional, seperti munculnya gerakan feminis di berbagai belahan dunia.

### MENOLAK HANYA SEBAGAI PELENGKAP

Jika ‘napak tilas’ sejarah dibuka kembali, tidak bisa tidak kita harus merujuk pada elemen pergerakan pe-

rempuan Islam yang ditemukan pada organisasi sayap perempuan yang bernaung di bawah organisasi massa Islam terbesar seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Awalnya kemunculan organisasi sayap tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Kenyataannya, mereka diposisikan dalam berbagai badan otonom atau organisasi sayap yang tidak punya pengaruh langsung dalam organisasi induknya. Program-program mereka memanifestasikan peran-peran tradisional yang ada di masyarakat seperti kegiatan pendidikan kerumahtanggaan, kesehatan ibu dan anak serta kegiatan di bidang sosial lainnya. Sedikit sekali peluang untuk memasuki peran yang lebih luas di dunia publik karena dianggap tidak sesuai dengan kodrat mereka.

'Tempat perempuan adalah dalam domain perempuan' begitu kata sebagian besar kyai di muktamar NU Lirboyo ketika muncul suara-suara untuk memasukan perempuan dalam struktur kepemimpinan di Pengurus Besar NU, yaitu *Syuri'ah* dan *Tanfidziah*. Keberadaan Muslimat dan Fatayat dianggap sudah mewakili keterlibatan perempuan NU dalam berorganisasi. Ang-

gapan ini dipertanyakan oleh beberapa aktivis perempuan dan kelompok muda NU. Menurut mereka sudah saatnya perempuan diberi kesempatan menduduki posisi kepengurusan di badan penting NU. Ini diperlukan untuk memasukan perspektif perempuan dalam keputusan-keputusan penting NU, bukan hanya dalam persoalan yang berhubungan dengan perempuan tapi juga dalam persoalan sosial kemasyarakatan lainnya.

Di lingkungan NU dikenal beberapa kyai yang dianggap mempunyai wawasan gender. Akan tetapi hal itu tidak menjamin kepentingan perempuan disuarakan dengan baik (Lihat : *Laki-laki harus Melakukan 'Class Suicide' sebelum menjadi Feminis*). Karenanya keinginan untuk mendudukan perempuan perempuan ke dalam struktur kepengurusan NU di Lirboyo belum terwujud. Menurut *Lily Munir*, aktivis Muslimat NU, prosesnya panjang dan diperlukan strategi yang matang. Soalnya masih banyak pengambil keputusan di muktamar ditentukan oleh kyai dari daerah yang sensitivitas gendernya dianggap masih kurang. Bagi mereka munculnya beberapa orang perempuan memimpin sidang di muktamar sudah dianggap pencapaian yang luar biasa.

## LAKI-LAKI HARUS MELAKUKAN 'CLASS SUICIDE' SEBELUM MENJADI FEMINIS.....

Isu pembebasan perempuan tidak hanya menjadi *concern* kaum perempuan. Dunia Islam mencatat beberapa nama laki-laki yang cukup berpengaruh dalam mensosialisasikannya. Sebut saja nama *Ghasim Amin* di Mesir, yang secara kontroversial melontarkan kritik tajam tentang posisi perempuan dalam tradisi agama. Dia bahkan berani mengidealkan 'perempuan model Barat' di kalangan umat Islam yang sangat konservatif waktu itu. Sayangnya, *Ghasim* terkesan sangat terkesima dengan Barat dan menjadikannya model ideal untuk semua hal, termasuk urusan perempuan. Untuk sikapnya ini, seorang feminis perempuan asal Mesir, *Laela Ahmad*, lebih suka menyebut *Amin* sebagai agen Barat di dunia Islam daripada seorang yang betul-betul peduli dengan persoalan perempuan.

Hal yang sama juga terjadi ketika, *Kemal At-Taturk* memerintahkan perempuan muslim membuka penutup kepalanya, di Turki. Dengan menggunakan isu modernisasi, ia juga menghilangkan hijab yang membatasi laki-laki dan perempuan dalam dunia publik. Dampak dari peraturan-peraturan *At-Taturk* memang luar biasa. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, *At-Taturk* telah mengubah sebuah masyarakat yang sangat konservatif menjadi masyarakat

'modern' yang diidam-idamkannya. Lantas, apakah mereka ini bisa digolongkan sebagai feminis? Orang bisa berbeda tafsir dalam hal ini, tapi kehadiran laki-laki dalam mensosialisasikan gagasan pembebasan terhadap perempuan jelas bisa berpengaruh. Mereka bisa menjadi semacam raga yang membuat beberapa hal menjadi lebih mudah. Dalam struktur masyarakat patriarkis, laki-laki berada di posisi atas. Mereka memiliki kekuasaan dan kemampuan. Kekuatan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberi jalan pada isu pembebasan perempuan.

Di awal masuknya wacana gender ke Indonesia, kita mengenal nama-nama *Asghar Ali Engineer* dan *Abdullah Ahmed An'aim*. Cara pandang mereka tak kalah tajam dibanding pemikir-pemikir perempuan seperti *Fatima Mernissi*, *Aminah Wadud*, *Rifaat Hassan*, dan lain-lain.

Di Indonesia dikenal *Masdar F. Mas'udi*, *Nasharuddin Umar*, *Hussein Muhammad* dan beberapa nama lainnya yang seringkali dikaitkan dengan wacana gender. Tulisan mereka selalu menjadi referensi bagi yang lain. Orang harus mengakui kontribusi mereka dalam membuka wacana dan melakukan tafsir kritis terhadap paham bias gender yang mengakar dalam tradisi keagamaan tradisional. Namun apakah

Kondisi yang sama juga terjadi di organisasi Muhammadiyah. Kelompok perempuan di tampung di organisasi sayap seperti *Aisyiah* dan *Naisyatul Aisyiah* (NA). Satu-satunya kemajuan yang perlu dicatat terjadi pada muktamar Muhammadiyah di Aceh tahun 1995 ketika *Majelis Tarjih* (sebuah lembaga kajian di Muhammadiyah yang memberi pertimbangan soal-soal keagamaan pada keputusan-keputusan organisasi) memberi rekomendasi pembentukan divisi khusus tentang perempuan dan keluarga. "Hadinya perempuan dalam *Majelis Tarjih* akan mempermudah masuknya perspektif gender dalam keputusan-keputusan Muhammadiyah," kata ketua umum IMM, *Gunawan Hidayat* yang banyak mengamati gerakan perempuan di kalangan Muhammadiyah. Divisi yang diketuai *Siti Ruhaini Dzuhayatin* tersebut juga diharapkan menjadi pra kondisi bagi perempuan untuk memasuki wilayah-wilayah yang saat ini masih tabu bagi mereka, seperti posisi-posisi strategis dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah yang selama ini hanya diduduki laki-laki.

Pemberontakan terhadap struktur organisasi yang tak memberi ruang bagi perempuan disuarakan lebih

keras dalam organisasi mahasiswa Islam seperti HMI, PMII dan IMM. Selama ini perempuan ditempatkan dalam organisasi sayap puteri yang hubungannya bersifat paternalistik dengan organisasi induknya. Ketua puteri diangkat dan bertanggung jawab pada Ketua Umum organisasi induk yang dipilih oleh kongres. Dalam kegiatan organisasi mereka diposisikan untuk membantu tugas putera sebagai panitia bagian konsumsi, pencari dana atau melakukan tugas-tugas kesekretariatan. Seandainya ada perempuan yang berusaha 'loncat pagar' dan membuktikan kemampuannya bersaing dengan laki-laki, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang *excellent* dan bukan tipikal perempuan umumnya. Ketika isu gender tumbuh dan mneyebar kalangan aktivis mahasiswa muslim, anggapan ini dipertanyakan.

Menurut Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI), *AD Kusumaningtyas*, isu gender mulai dibicarakan teman-temannya sejak awal 90-an. Dimulai dari cabang Jogja yang terkenal dengan pemikiran radikalnya, isu gender mulai merambah ruang-ruang yang selama ini jarang dibicarakan seperti isu kepemimpinan perempuan, hak politik perempuan dan lain sebagainya.

karya-karya mereka telah bisa dianggap sepenuhnya mencerminkan perspektif gender?

Sebagian besar pemikir muslim di Indonesia masih melihat isu gender sebagai sebuah studi. Sama halnya dengan studi antropologi, filsafat, dan seterusnya. Tidak heran *Nasharuddin Umar*, misalnya, lebih suka menyebut dirinya sebagai ahli tafsir, dan bukan ahli gender. Gender hanya menjadi salah satu minatnya. Hal itu juga terjadi pada pemikir-pemikir muslim lainnya. *Masdar* saat ini lebih memilih *concern* pada *fiqih siyasah*, *fikih* politik. Ketika *Asghar Ali Engineer* menulis tentang teologi pembebasan, nuansa gender kurang atau bisa dikatakan tidak terlihat di dalamnya.

Bandingkan dengan karya-karya pemikir perempuan seperti *Fatima Memissi*. Baginya, gender adalah sebuah 'keharusan'. Ketika dia berbicara tentang demokrasi selalu akan diikuti soal gender. Persoalan demokrasi tak mungkin dilepaskan dari persoalan gender. Demikian pula saat ia bicara tentang politik Islam, ia akan melihatnya dari sudut pandang gender.

Tidak mudah bagi laki-laki menjadi seorang feminis. Sistem yang membangun mereka adalah sistem patriarkis yang telah memberi mereka peran-peran istimewa. Banyak yang mengatakan karya laki-laki tentang gender sangat *artificial*, tidak akan menyentuh persoalan-persoalan mendasar karena mereka tak mengalami penderitaan kaum perempuan. Karya-karya yang berperspektif gender tidak serta-

merta menjadikan mereka feminis.

*Budi Munawar Rahman* yang banyak menulis tentang gender dan Islam juga mengakui sulit bagi laki-laki menjadi feminis. "Anda boleh melihat bagaimana 'feminis' laki-laki memperlakukan isteri-isterinya di rumah. Bagaimana mereka memperlakukan rekan-rekan perempuan di tempat kerja, kata *Budi* menantang. Adakah laki-laki yang rela melepaskan hak-hak istimewa yang telah tertanam dalam dirinya selama ini? Laki-laki seharusnya melakukan 'class suicide' (bunuh diri kelas) dulu untuk bisa menjadi feminis!"

Mungkin itu lontaran yang ekstrim. Dalam sistem yang sudah mengakar, laki-laki tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Patriarkisme sudah menjadi identik dengan agama dan budaya selama berabad-abad. Mungkin mereka juga termasuk korban yang kebetulan termatikan dalam sistem tersebut. Kalau mereka berusaha menjadi feminis, kenapa tidak? Sebab kalau hanya perempuan yang mengusung isu gender, orang hanya menganggapnya sebagai isu khas perempuan. Padahal, secara sosiologis, isu gender merupakan persoalan kesetaraan yang muncul dalam kehidupan laki-laki dan perempuan. Untuk menjadikannya isu bersama, haruslah semakin banyak laki-laki yang terlibat. Seperti kata *Syafiq Hasyim* (tim RAHIMA yang sedang studi di Universitas Leiden-Belanda), "Paling tidak laki-laki bisa belajar....."

(Nef)

Struktur organisasi yang tak memberi tempat bagi perempuan di posisi-posisi strategis juga mulai digugat. Mereka tak puas lagi hanya menjadi pelengkap penderita dalam organisasi. Sejak akhir tahun 90-an, KOHATI telah menjadi organisasi semi otonom di HMI. Ketua Umum KOHATI tak lagi dipilih dan bertanggung jawab terhadap ketua umum HMI. Hubungan dengan HMI hanya bersifat koordinatif.

Pergulatan yang terjadi di Korps-PMII-Puteri (KOPRI) lebih keras lagi. Berkumpul dalam lembaga semi otonom dianggap mempersempit ruang gerak perempuan. Karenanya, KOPRI harus dibubarkan untuk memperluas kesempatan perempuan, termasuk kesempatan untuk menjadi ketua umum PMII. Menurut *Luluk Nurhamidah*, mantan ketua umum KOPRI, tidak ada peraturan organisasi yang menyatakan bahwa ketua umum harus dipegang laki-laki. Sayangnya, fakta ini tak mengurangi semangat sebagian besar anggota KOPRI untuk membubarkan diri. Menurut mereka satu-satunya jalan untuk bisa bertarung bebas dengan laki-laki adalah meleburkan perempuan dalam organisasi Phadis MII.

Realitas pembubaran KOPRI ternyata sangat disayangkan beberapa mantan pengurus KOPRI karena tidak diiringi dengan strategi yang matang. Menurut mereka, seharusnya dilakukan negosiasi tentang kuota perempuan pada semua *level* kepengurusan, hal ini tidak dilakukan oleh pelopor pembubaran KOPRI. Kenyataannya dalam struktur PB PMII hanya ada satu ketua dan sekretaris perempuan serta satu lembaga yang diketuai perempuan, yaitu lembaga kajian wanita. Hal yang justru menggambarkan kemunduran.

Pembubaran KOPRI juga disayangkan oleh seorang aktivis perempuan yang tak mau disebutkan namanya. Dihubungkan dengan rencana otonomi daerah, menghilangkan organisasi perempuan berarti mempersempit peluang penguatan isu-isu perempuan di tingkat yang lebih bawah. Jangan-jangan pembubaran KOPRI hanya sebuah siasat patriarkis, kata aktivis tadi menambahkan.

Terlalu dini untuk menyimpulkan pembubaran KOPRI sebagai sebuah kegagalan perjuangan perempuan. Bergabungnya KOPRI ke tubuh PMII bisa menjadi semacam 'eksperimen' tentang perempuan dalam organisasi Islam. Soalnya, ada anggapan sebagian pengamat yang menyatakan bergabungnya perempuan dan laki-laki dalam sebuah wadah yang bernafaskan Islam sebagai sesuatu yang tidak kondusif. Anggapan mereka didasarkan pada pengamatan atas

menghilangkan organisasi perempuan berarti mempersempit peluang penguatan isu-isu perempuan di tingkat yang lebih bawah.

realitas kemunculan partai-partai yang berlandaskan Islam dalam era reformasi yang sedikit sekali mengakomodasi kelompok perempuan (Lihat : *Isu Perempuan Hanya Sebatas Komoditas Politik*). Menurut *Ermalena*, pengurus DPP PPP, partai-partai Islam masih bernuansa patriarkis sehingga peluang

perempuan untuk memasuki ruang dan isu strategis masih mengalami kendala. Berkembangnya wacana keagamaan yang lebih menghargai hak-hak politik perempuan tak lebih dari strategi politik semata. Dan itu terjadi bukan hanya dalam partai-partai Islam saja. *Ermalena* lebih menekankan terbentuknya undang-undang yang mencantumkan kuota perempuan untuk setiap partai. Karenanya perlu dilakukan advokasi dan 'tekanan' pada parlemen untuk membentuk undang-undang semacam itu. persoalannya, seberapa banyak orang (terutama perempuan) yang peduli dengan hal seperti ini. Sampai saat ini, masih ada anggapan di masyarakat

bahwa politik adalah wilayah yang tabu bagi perempuan.

#### KRITIK TERHADAP WACANA KEAGAMAAN PATRIARKIS

Merebaknya gerakan perempuan Islam di Indonesia akhir-akhir ini harus diakui banyak terinspirasi oleh feminis Islam dari Timur Tengah seperti *Fatima Merinissi*, *Rifat Hassan* dan lain-lain. Tuduhan sebagian kalangan bahwa feminisme banyak mengan-dung nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam tidaklah mengkhawatirkan sebagian dari mereka. Kelompok ini malah berpendapat bahwa ide normatif Islam sesungguhnya mengusung nilai-nilai feminis yang telah dijun-gkir balikan oleh pelaku-pelaku sejarah yang punya watak *misoginis*. Karena itu tugas penting yang harus dilakukan adalah merekonstruksi seluruh tradisi keagamaan patriarkis yang telah berurat berakar dalam tradisi Islam selama berabad-abad.

Menurut kelompok feminis Islam, rekonstruksi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini tersimpan rapi dalam 'otoritas' keulamaan tradisional harus lebih diprioritaskan karena merupakan sumber ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam. Ajaran-ajaran tersebut telah menjadi sumber legitimasi peminggiran perempuan dalam wilayah sosial, politik, hukum baik dalam lingkup publik maupun domestik.

Adalah *Wardah Hafidz*, yang berperan penting mensosialisasikan urgensi melakukan kritik terhadap tradisi keagamaan yang telah mapan ke dalam ling-

## Wawancara dengan Ermalena MHS,

Aktivist Partai Persatuan Pembangunan

# ISU PEREMPUAN HANYA SEBATAS KOMODITAS POLITIK

**RAHIMA** : Sejak era reformasi banyak bermunculan partai-partai yang berazaskan Islam seperti PPP, PBB, PNU, PK dll, atau partai yang berbasiskan masyarakat Islam seperti PKB. Bagaimana pengamatan anda tentang posisi perempuan di partai-partai tersebut ?

ERMALENA : Kondisinya tak jauh berbeda dengan waktu sebelumnya (sebelum reformasi-Red.) Hanya sedikit perempuan yang diakomodasi dalam kepengurusan partai. Kalau mereka jadi pengurus, posisinya pun tidak strategis. Di Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), hanya ada satu perempuan di Badan Pengurus Harian (BPH), itupun posisi bendahara. Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada satu perempuan di posisi wakil sekretaris. Saya pikir kondisi yang sama terjadi di partai-partai Islam lain. Jumlah perempuan yang mewakili partai juga sedikit sekali. PPP hanya punya dua wakil perempuan, PKB tiga wakil perempuan. Terjadi penurunan yang luar biasa.

### R : Apa penyebabnya ?

E : Saya melihat 4 faktor penyebabnya. *Pertama*, ada budaya politik dan wacana keagamaan patriarkis yang masih kuat di partai-partai tersebut. Mana ada partai yang memberi ruang lebih untuk perempuan. Mereka hanya dilibatkan pada tugas-tugas yang berhubungan dengan peran domestik yang dianggap bukan ukuran kemajuan. *Kedua*, soal kemampuan perempuan. Kalau ada tuntutan supaya perempuan di beri peluang lebih di partai, mereka bertanya, "Mana perempuannya?, Mana perempuan yang punya kemampuan?". Ya terang dong perempuan kurang punya kemampuan karena jam terbangnya sedikit, karena tidak diberi peluang. *Ketiga*, ada anggapan di masyarakat yang melihat politik itu bukan ruang untuk perempuan, bukan pilihan yang tepat bagi perempuan. Anda boleh lihat berapa banyak keluarga yang memberi dorongan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Berapa banyak orang tua atau para suami yang menyokong karir anak atau istrinya di parlemen. *Keempat*, ada yang menganggap kendalanya pada psikologis perempuan sendiri, meski saya tak setuju itu. Di partai itu *fightnya* kan sangat kuat sekali. Menurut mereka, perempuan Indonesia masih punya budaya malu untuk memperebutkan sebuah posisi. Perempuan malu untuk menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan. Ada juga yang menganggap mental perempuan akan melemah bila dihadapkan pada kondisi

tertentu.

**R** : Bukankah sekarang sudah berkembang wacana dari beberapa partai politik Islam yang memperbolehkan perempuan jadi pemimpin ?

E : Menurut saya, itu politis saja.

**R** : Ada penyebab lain kenapa hanya sedikit wakil perempuan dari partai politik Islam di parlemen ?

E : Saya pikir ada hubungan dengan sistem distrik. Sekarang ini berapa banyak perempuan yang punya akses di distrik. Biasanya kan para kyai atau ulama yang dianggap lebih berpengaruh di sana. *Aisyah Amin* sekarang ini paruh waktu di parlemen karena suaranya tak cukup waktu pemilihan sistem distrik kemarin. PPP mempertahankan dia karena kualitas dan pengalamannya. Kalau ia ditarik, berarti hanya dua wakil perempuan PPP di parlemen. Ini realitas juga.

**R** : Apakah perlu ada kuota untuk perempuan di partai-partai tersebut.

E : Nah ini yang ingin saya katakan. Yang diperlukan itu adalah perubahan undang-undang tentang partai politik yang memasukan unsur kuota ini. Sebab kalau kita hanya teriak-teriak saja di muktamar, di media massa. Mereka mengiyakan, tapi kenyataannya bagaimana ?

**R** : Menurut anda apa yang harus dilakukan untuk merubah kondisi ini ?

E : Harus ada aliansi diantara teman-teman yang peduli dengan kondisi ini. Dan ini bisa dilakukan LSM bersama masyarakat. Dalam aliansi tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan. *Pertama*, melakukan kajian pada perangkat undang-undang yang ada. Kalau undang-undang tak memenuhi ketentuan yang kita inginkan, kita bisa membuat rancangan sendiri yang bisa kita advokasikan ke partai politik atau parlemen. Ada undang-undang yang mengatur ruang-ruang untuk advokasi tersebut, hanya tak banyak yang tahu. *Kedua*, aliansi tersebut harus merancang pemutusan mata rantai pemahaman di masyarakat yang menganggap politik bukan dunia untuk perempuan. Hal itu yang sekarang saya lakukan dengan beberapa orang teman *Mitra Perempuan* dan *Koalisi Perempuan*. ●

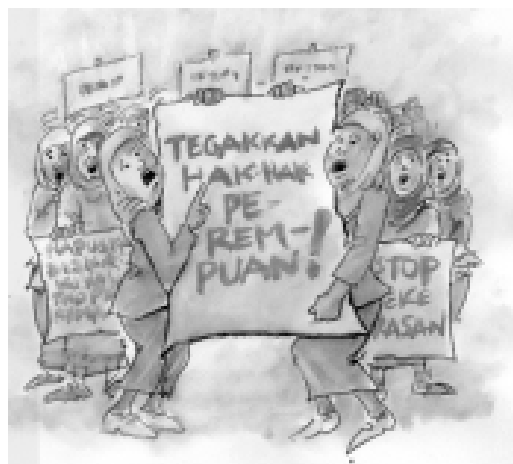


kungan perempuan Islam di Indonesia. Tulisan-tulisannya banyak dimuat dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, media Islam pertama yang giat mempopulerkan gagasan-gagasan feminis Islam. Hadirnya buku-buku yang ditulis Rifaat Hassan, Aminah Wadud Hussein, Fatima Mernissi dan kawan-kawan pada awal tahun 90-an menambah semarak gerakan ini. Buku-buku tersebut di baca dan dikaji oleh berbagai kelompok diskusi, LSM dan perguruan tinggi yang menjamur di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Dari kelompok-kelompok tersebut kemudian bermunculan pemikir-pemikir feminis Islam yang karya-karyanya tak kalah tajam dibanding rekan mereka dari Timur Tengah. Di awal tahun 90-an, Lies Marcoes bekerja sama dengan INIS, menerbitkan buku berjudul *Wanita Islam Dalam Kajian Tesktual dan Kontekstual* yang diangkat dari seminar dengan tema yang sama pada tahun 1992. Buku tersebut dianggap sebagai salah satu karya intelektual yang menyorot persoalan-persoalan perempuan Islam dalam konteks ke Indonesia-an.

Yang menarik banyak karya rekonstruksi tentang perempuan setelah itu dilahirkan oleh NU yang pola keberagamannya dianggap tradisional. Karya-karya yang dihasilkan pemikir NU seperti Masdar Farid Mas'udi, Zaitunnah, Nazaruddin Umar, KH. Hussein Muhammad tergolong sangat berani, suatu hal yang jarang ditemukan dalam karya-karya Islam umumnya. Baru-baru ini muncul lagi karya pemikir NU, Syafiq Hasyim, yang dengan lugas mempertanyakan kembali seluruh dalil-dalil keagamaan yang telah mapan selama ini. Dalam bukunya, *Hal-hal Yang tak Terpikirkan dalam Fikih Perempuan*, Syafiq menggambarkan bagaimana rekonstruksi patriarkis yang sangat kuat terhadap perempuan ditemukan dalam kitab fikih *al-munakahah*, kitab tentang aturan berumah tangga yang banyak dipakai di kalangan penganut mazhab *Syafe'i*.

Kajian gender juga telah memasuki lingkungan akademis. Di lingkungan perguruan tinggi Islam menjamur pusat-pusat studi wanita yang banyak melakukan sosialisasi gender di lingkungannya. Mereka berusaha memasukkan kajian gender dalam kurikulum pendidikan Islam. Tidak hanya itu, PSW IAIN Syarif Hidayatullah misalnya, juga melakukan kajian kritis terhadap bias-bias gender yang terdapat dalam bidang studi yang dipelajari di IAIN seperti filsafat, tafsir, akidah, sejarah Islam dan lain-lain. Yang menarik, pemahaman-pemahaman patriarkis tak dominan dalam tradisi spritual Islam (tasawuf). *Ibn Arabi*, misalnya, menggambarkan citra Tuhan Yang Maha Pengasih sebagai sesuatu yang bersifat feminin. Jalan Tuhan adalah jalan feminin. Karenanya perempuan seperti *Rabi'ah Al-Adawiyah* diakui ketinggian ilmunya tanpa mempersoalkan jenis kelaminnya.

Sosialisasi wacana gender juga dilakukan LSM Is-



lam seperti yang dilakukan divisi *Fiqhun Nisa* P3M (sekarang RAHIMA). Dengan fokus pada hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam, lembaga ini secara intensif sejak tahun 1994 aktif mengadakan pelatihan dan membentuk *halaqah* (kajian tematik) di pesantren-pesantren di Jawa dan Madura. Sasarannya adalah kelompok elit pesantren seperti kyai, nyai dan ustadz-ustadzah muda. Kegiatan ini diakui berdampak besar terhadap pola pemahaman keagamaan pesantren terutama yang menyangkut persoalan-persoalan perempuan. Hal yang sama juga dilakukan Fatayat NU dengan tekanan sasaran pada perempuan-perempuan muda pedesaan yang banyak mengalami ketidakadilan dan kekerasan karena pemahaman keagamaan yang bias gender. Fatayat sekarang juga telah mempunyai sekitar 26 Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan (LKP2) di seluruh Indonesia yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### HATI-HATI DENGAN PERUBAHAN

Ternyata tidak semua kelompok perempuan setuju dengan ide-ide emansipasi perempuan seperti yang banyak disuarakan kaum feminis Islam. Kelompok ini banyak ditemukan di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada perguruan tinggi umum di Indonesia seperti UI, ITB, UGM dan lain-lain. Mereka tidak setuju dengan kecenderungan melakukan perombakan terhadap strotipe perempuan yang telah mapan dalam tradisi Islam selama ini. Menurut mereka, laki-laki memang punya kelebihan dibanding perempuan. Melakukan penyamaan antar mereka berarti menyalahi hukum alam.

Kecurigaan terhadap aura pembaharuan yang ditularkan gerakan feminis Islam sangat kental dalam kelompok ini. Menurut mereka, feminis adalah Barat dan barat harus ditolak. Ada juga yang menuduh feminisme sebagai produk Yahudi. (Lihat : *Menghindari*

## Wawancara dengan Lisda Warastuti,

Ketua Lembaga Penerbitan Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI)

# MENGHINDARI STIGMA FEMINIS

**RAHIMA : Bagaimana posisi dan peran perempuan dalam KAMMI?**

LISDA : Di lembaga kami, perempuan memperoleh akses yang sama dengan laki-laki, tidak ada perbedaan seksis disini. Dari jumlah yang cukup besar, sedikit sekali perempuan yang bisa menempati posisi strategis, paling tinggi di koordinator bidang. Muslimah di KAMMI itu hanya jadi *floating mass*, artinya ada ketika ada aktivitas atau aksi. Kami hanya dijadikan sebagai *supporting system* saja. *Akhwat* (sebutan untuk perempuan di KAMMI) hanya dimanfaatkan saat pemilihan, karena jumlah suaranya cukup signifikan.

**R : Bagaimana gambaran anda tentang perempuan ideal dalam pandangan Islam?**

L : Menurut KAMMI, muslimah boleh melakukan peran publik, selama peran domestik tidak ditinggalkan. Itu yang dijaga dari ayat *khatida*, *khadijat*, *shaliha*. Masalahnya, di KAMMI sebagian muslimahnya sudah menikah. Jika yang kita andalkan menikah, kemudian peran domestik menjadi prioritas utamanya. Mereka menarik diri dari kegiatan. Kita sangat sayangkan itu.

**R : Apa pendapat Anda tentang pemberdayaan perempuan yang akhir-akhir ini menjadi isu yang cukup hangat ?**

L : Menurut saya, ketika akses sudah dibuka secara luas maka poin pertama pemberdayaan sudah terjadi. Isu feminis kan meminta akses-akses itu dibuka, termasuk dalam bidang sosial, politik. Selanjutnya adalah persoalan kuantitas. Banyak muslimah di KAMMI, tapi yang bisa sampai pada posisi strategis sangat sedikit. Ini seharusnya yang perlu diberdayakan! Artinya, muslimah harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, bukan sebagai penggembira.

**R : Isu-isu apa saja yang menjadi konsentrasi kelompok putri KAMMI?**

L : Salah satu isu terpenting yang jadi pembicaraan muslimah KAMMI adalah membentuk departemen sendiri bagi perempuan. Tapi itu masih kontroversial. Ada yang mengatakan melembagakan perempuan dalam satu wadah itu merupakan *set back*. Menyatukan muslimah dalam satu wadah berarti kembali ke hal-hal yang konvensional. Tanpa wadah tertentu pun muslimah sudah terakomodasi. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa kita tetap butuh wadah karena banyak permasalahan perempuan yang tidak bisa melibatkan

*Stigma Feminis*). Stigma menjadi feminis sangat dikawatirkan perempuan-perempuan yang ada dalam kelompok ini sehingga mereka sangat berhati-hati melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang dipersoalkan feminis Islam seperti penafsiran surat An-Nisa tentang ayat *arrijalu qawwamu 'alannisa* tidak muncul dalam kelompok ini.

"Kami sepakat bahwa pemimpin itu adalah laki-laki" kata Nova dari LDK UNAS. Dengan pemahaman ini mereka tak mempersoalkan sedikitnya jumlah perempuan yang masuk dalam struktur atau menduduki posisi strategis dalam organisasi. Mereka tidak merasa mengalami subordinasi. Yang penting perempuan tetap memperoleh akses yang sama dengan laki-laki, kata Lisda, seorang aktivis KAMMI. Sayangnya, ia tidak menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan akses yang sama tersebut.

Kelompok ini juga menolak kecenderungan untuk melakukan dekonstruksi terhadap *ahwal al-munakahah* dalam Islam. Menurut mereka, fondasi terkuat masya-

rakat Islam adalah keluarga. Cita-cita ideal masyarakat Islam hanya bisa terwujud jika bangunan keluarga muslim kuat. Karenanya tugas perempuan dalam keluarga menjadi sangat penting. Mereka menyangkan banyak perempuan yang melalaikan tugasnya sebagai pendidik dan penjaga moralitas keluarga. Fungsi perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga tak kalah mulia dari pencapaian perempuan di sektor publik. Mereka tak menolak peran publik perempuan selama peran domestiknya tidak dilalaikan.

Keseimbangan itu harus dijaga, kata Dwi Septi-awati pemimpin redaksi majalah UMMI. Media perempuan Islam yang sekarang mempunyai oplah lebih dari 85.000 eksemplar ternyata dikelola ibu-ibu yang sukses membagi waktu di sela-sela tugasnya dalam rumah tangga. "UMMI *concern* dengan pemberdayaan perempuan selama tetap berada dalam koridor Islam", Septi menambahkan. Isu kesetaraan gender bukan sekedar membela perempuan tapi berpihak pada kebenaran. UMMI mengangkat berbagai persoalan yang menimpa perempuan seperti kekerasan dalam

*ikhwan* (sebutan untuk saudara laki-laki di KAMMI). Di pengurusan *Andi Rahmat* (Ketua Umum KAMMI), dibentuk tim *ad hoc* untuk merumuskan perlu tidaknya lembaga khusus tersebut.

**R : Bagaimana pendapat anda tentang gerakan feminis Islam dan isu-isu yang mereka angkat?**

L : Ada sedikit kesalahpahaman tentang gerakan perempuan. Misalnya, banyak sekali *ikhwan* dan *akhwat* dibesarkan dengan pemahaman bahwa feminis itu buruk, feminis itu barat dan harus ditolak. Feminisme dekat dengan liberalisasi, dan liberalisasi itu produk Yahudi. Penyederhanaan seperti itu kemudian menengerdikan kita. Padahal, menurut saya, tidak semua produk barat itu buruk. Ada hal-hal baik juga yang bisa kita ambil dari barat.

**R : Bagaimana pendapat KAMMI tentang kelompok yang mencoba melakukan rekonstruksi terhadap beberapa penafsiran keagamaan yang dianggap bias gender?**

L : Muslimah KAMMI berhati-hati sekali dalam menginterpretasi ayat. Hal itu juga terjadi di *Gema Khadijah* dan LDK. Salah menginterpretasi, kita akan diberi stigma seperti feminis, keluar dari *khitoh*, dan lain-lain. Tetapi dalam menginterpretasikan ayat seperti *arrijalu qawwamu 'alannisa*, *Gema Khadijah* dan KAMMI memiliki kesamaan pandangan. Bagi kami kepemimpinan laki-laki bukan dalam artian *physically* tapi lebih berhubungan dengan emosional dan permasalahan yang sifatnya emotif, intuitif. Ayat itu bisa ditafsirkan bahwa baik laki-laki dan perempuan harus mempunyai

jiwa kepemimpinan. Pemimpin laki-laki dan perempuan harus terdapat aspek-aspek kepemimpinan.

**R : Bagaimana dengan kepemimpinan perempuan di KAMMI?**

L : Waktu ketua Humas KAMMI pusat, *Mbak Aji*, berbicara di forum pada pertemuan nasional di Jogja, terjadi kontroversi. KAMMI Pusat sendiri masih terjadi tarik-menarik tentang kemunculan perempuan memimpin. Dalam AD/ART KAMMI dicantumkan bahwa ketua umum itu harus laki-laki. Tapi apa yang terjadi di beberapa daerah di Jawa, menarik sekali. Ada ketua departemen kajian *syafiqi*-yaitu departemen yang sarat dengan kajian-kajian politik-dipegang oleh muslimah. Kami yang berada di pusat sempat terbengong-bengong..

**R : Bagaimana tentang perjuangan perempuan di struktur KAMMI?**

L : Struktur merupakan hak prerogatif ketua umum. Ketua umum di-back up oleh *Dewan Syuro* (badan permusyawaratan) yang terdiri dari pengurus demisioner. Sekarang ada dua orang perempuan di sana. Tapi masih ada cacatnya. Bila ketua umum yang memiliki perspektif gender, perempuan akan terakomodir disana. Jika tidak, maka akan lepas begitu saja.

**R : Ngomong-ngomong bagaimana pendapat perempuan KAMMI tentang poligami?**

L : Banyak diantara mereka mengatakan "Kalau untuk orang lain silahkan, tapi tidak untuk saya." ●

rumah tangga, pelecehan seksual dan kekerasan di dunia publik. Akan tetapi tidak selamanya perempuan menjadi korban kekerasan. Mereka juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Dalam majalah UMMI ada KOLOM AYAH yang mengungkap keluh kesah laki-laki yang mengalami penderitaan akibat kesewenangan perempuan.

**PENUTUP**

Pemetaan awal ini menyiratkan adanya keragaman model dan kecenderungan gerakan perempuan Islam di Indonesia. Keragaman tak harus dilihat sebagai sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan. Nabi Saw bersabda *ikhthilafil ummmati rahmah*. Di tengah meruaknya konflik dan kekerasan yang muncul dari berbagai kelompok Islam karena perbedaan ideologi, hal yang sama diharapkan tak terjadi pada kelompok perempuan Islam di Indonesia.

Orang boleh menilai sebagian gerakan perempuan sebagai sesuatu yang bernuansa progresif dan sebagian lain bernada kemunduran. Pilihan apapun

yang dilakukan elemen gerakan perempuan menjadi sah saja selama itu memberi solusi pada persoalan-persoalan riil mereka. Karenanya pemikir Islam liberal seperti *Laela Ahmad* dalam bukunya *Women and Gender in Islam* sangat menghargai *Zaenab Al-Ghazali* yang dikategorikan *revivalis\** karena lebih berpijak pada persoalan yang timbul pada masyarakatnya daripada orang yang mengadopsi gagasan Barat tanpa pertimbangan praktis sama sekali. Sikap *Laela Ahmad* ini perlu ditiru. Ideologi apapun yang dipilih setiap orang tidak pernah final karena ideologi muncul dari kompilasi pikiran manusia dalam merespon situasi zamannya. Semua itu bisa berubah. Semua itu berproses. Karenanya dialog sangat penting dalam mencari alternatif yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk tantangan pemberdayaan perempuan.

● (Nefisa Viviani)

\* Istilah *revivalis* digunakan sebagai padanan kata fundamentalis. Kata fundamentalis tidak digunakan karena mengandung beberapa masalah baik ilmiah maupun ideologis.



## Wacana Gender Dalam Gerakan Perempuan Islam Indonesia

Wawancara dengan Budi M. Rahman,

Manajer Pendidikan Yayasan Paramadina dan Dosen STF Diryakara

Jika bicara tentang gerakan perempuan Islam di Indonesia tidak bisa tidak kita harus bicara tentang wacana gender. Perkembangan wacana gender di Indonesia saat ini menjadi sangat liberal. Karya-karya pemikir Indonesia bahkan tak kalah dari pemikir luar seperti *Mernissi*, *Rifaat Hasan*, dan lain-lain, meski inspirasi awal diperoleh dari mereka. Sayangnya, meskipun berkembang pesat dalam wacana, dalam praktiknya dirasakan masih lambat. "Mungkin diperlukan seorang yang sangat keras, seorang perempuan feminis yang sangat radikal," ujar Manajer Pendidikan di *Yayasan Paramadina* yang juga dosen STF Diryakara ini. Ikuti pandangan-pandangan *Budi M. Rahman* yang kritis dan segar dalam mengamati fenomena dan isu gender dalam gerakan perempuan Islam di Indonesia, dalam wawancaranya dengan *Nefisa Viviani* dan *Dwi Rubiyanti* dari RAHIMA.

Isu gender telah mendorong satu kesadaran yang khas bukan hanya semata-mata karena pandangan filosofis atau wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Dari segi wacana, isu ini sudah berkembang sangat pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal.

**RAHIMA : Bagaimana awal masuknya isu gender ke kalangan perempuan Islam di Indonesia?**

BUDI : Wacana gender mulai dikembangkan di Indonesia pada era 80-an, tapi mulai memasuki isu keagamaan pada era 90-an. Isu itu berkembang sejalan dengan masuknya buku-buku terjemahan yang berwawasan gender yang bisa dikategorikan feminis. Buku-buku tersebut tergolong kontroversial untuk ukuran waktu itu, diterbitkan oleh Balai Pustaka Institut Teknologi Bandung (ITB), kelompok yang garis keislamannya cenderung fundamentalis. Hal ini sangat mengherankan dan mentakjubkan tapi itulah yang terjadi di ITB saat itu.

Ketika *Rifaat Hassan* berkunjung pertama kali ke Indonesia, respon terhadap isu gender berkembang sangat cepat saat itu. Selain itu, majalah *Ulumul Qur'an* juga terlibat dalam memperkenalkan wacana gender secara besar-besaran dengan memuat artikel-artikel *Rifaat Hassan*, *Ivonne Haddad* dan beberapa penulis lainnya. Kemudian, yang juga tak bisa dipungkiri adalah sumbangan *Wardah Hafidz*, yang mengambil spesialisasi bidang gender dan Islam. Dia yang melakukan rintisan dalam mensosialisasikan wacana tersebut di Indonesia. Selain itu, ada *Lies Marcoes*.

Bisa dikatakan, selama sepuluh tahun atau lima tahun terakhir ini perkembangan isu gender sangat pesat dan sangat produktif sekali, jauh lebih pesat dari isu-isu lainnya seperti isu pluralisme, yang juga tak kalah pentingnya.

**R: Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?**

B : Banyak orang yang bekerja pada isu gender

karena isu tersebut sangat aktual, meski isu pluralisme juga sangat aktual. Isu gender telah mendorong satu kesadaran yang khas bukan hanya semata-mata karena pandangan filosofis atau wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Dari segi wacana, isu ini sudah berkembang sangat pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal.

**R: Bagaimana reaksi yang terjadi ketika awal isu gender dilemparkan ?**

B : *Ulumul Qur'an* pernah memunculkan satu nomor khusus tentang isu gender pada tahun 1995, banyak orang antusias. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal ini. *Pertama*, isu gender itu tidak sampai ke para ke petinggi agama seperti kyai, apalagi ke masyarakat. *Kedua*, masyarakat tidak terlalu peduli dengan wacana yang susah-susah.

Harus diakui isu gender waktu itu masih berputar di kalangan terpelajar, mahasiswa, dosen dan para peminat studi keilmuan. Fenomena ini terjadi bukan hanya di kalangan Islam saja tapi juga pada masyarakat umum.

Lembaga feminis seperti *Kalyanamitra* banyak memberi sumbangan dalam mempopulerkan isu gender di Indonesia. Termasuk juga yang dilakukan oleh teman-teman di Yogyakarta, seperti *Rifka Annisa*, *Yasanti*, *LSPPA* (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), dan lain-lain.

Saya pikir ada kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang isu gender ini. Memang ada kontroversi yang terjadi, tapi tidak setajam ketika *Cak Nur* melontarkan isu sekularisme, isu yang berhubungan dengan demokrasi dan politik Islam. Isu gender di Indonesia bisa disejajarkan dengan isu Islam dan politik. Ada masa-masa ketika isu tersebut bisa sangat kontroversial.

Saya pikir ada bagusnya isu gender tidak menjadi sangat kontroversial, tidak sampai menjadi stigma. Meski itu dirasakan juga oleh *Wardah*, *Ruhaini Dzuha-yatin*, dan kawan-kawan. Saya pikir *Farha Ciciek* tumbuh pada masa yang sangat menentukan dalam perkembangan gender.

Saat itu, *Ciciek* bekerja sama dengan UII Yogya, pernah membuat sebuah seminar yang luar biasa tentang isu gender dalam ibadah. Saat itu, hal yang dilakukannya sangat kontroversial, meski sekarang juga masih kontroversi. Isu tersebut hingga kini masih belum dibuka dan dibicarakan secara publik, tapi hanya dibicarakan di kelas-kelas, kelompok diskusi tertentu, di pelatihan-pelatihan gender. Bagaimanapun, itu memberi penyemaian yang baik sekali. Suatu saat nanti ke-

tika kontroversi itu muncul, orang-orang sudah siap, sudah matang.

Isu-isu awal feminisme mengenai teologi penciptaan, seperti yang ditemukan dalam karya *Rifaat Hasan*. Setelah karya-karya *Fatima Mernissi* diterjemahkan, isunya menjadi lebih kaya. Orang didorong untuk memikir-ulang hal-hal yang dulu tidak terpikirkan. Misalnya bayangan kita mengenai surga. Hal itu dengan bagus sekali telah diungkapkan oleh *Fatima Mernissi*.

Di sana dia menggugat penafsiran surga yang dilakukan oleh para ulama. Bayangannya surga hanya untuk laki-laki. Di sana ada bayangan mengenai *huri*, perempuan yang menjadi pasangan di surga. Qur'an sendiri tidak menyebutkan angka berapa, tapi ternyata ulama telah melipat gandakannya sesuai dengan nafsunya sendiri. Dia bikin puisi yang bagus sekali "**Perempuan dalam surga kaum muslimin**" (Lihat buku *Setara dihadapan Allah*, LSP-PA).

**R : Berkaitan dengan isu gender ini, menurut Anda, isu kepemimpinan Mega yang juga dimunculkan kalangan politikus Islam, apakah tidak lebih dari kebutuhan politik sesaat daripada kesadaran menumbuhkan suatu kesadaran gender?**

B : Sebagai simbol, tentunya jauh lebih baik dari pada tidak ada sama sekali. Kalau terjadi, secara konstitusional memang pasti akan didukung karena memang akan jatuh pada Mega. Siapa lagi?

**R: Berarti, bisa dikatakan, terjadi perubahan cara pandang dalam melihat persoalan kepemimpinan perempuan saat ini?**

B : Ya, bulan-bulan yang lalu sudah ada pernyataan resmi dari PPP, PBB, atau partai-partai yang berbasis *syari'ah* Islam, seperti partainya *Nur Mahmudi Ismail* (Partai Keadilan-Red) bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dengan alasan *dharurah*. Dan itu pragmatis! Tapi mau apa lagi karena sekarang kan *nggak* mungkin mengusulkan Pemilu, apalagi dalam sistem presidensiil. Mereka harus menunggu selama lima tahun kan? Dan satu-satunya cara untuk mendelegitimasi *Gus Dur* adalah dengan mendukung *Mega*.

Untuk itu, dibuatlah sedikit pembacaan ulang terhadap tafsir keagamaan. *Jama'ah Paramadina* yang terbiasa berpikir rasional sampai bingung bagaimana paradigma keagamaan bisa berubah karena politik. Itu wajar saja, dalam Islam memang terjadi begitu! Pemikiran alternatif akan tersedia selalu di dalam *fiqh*. Dan itu biasa. Seperti karikaturnya Bapak *Ibrahim Hoesein* tentang hukum makan daging kodok, boleh atau tidak

karena Islam tak mengenal hirarki keagamaan seperti Katolik, maka pluralitas pandangan tentang isu gender ini akan sangat beragam sekali.

boleh. Anda mau yang mana? Boleh atau tidak boleh? Di fiqih semua jawabannya ada.

Isu gender juga begitu. Kalau mau loncat pada pilihan yang membolehkan sebenarnya mudah saja. Tak harus menggunakan argumentasi feminis. Tapi menurut saya, lebih dari sebuah simbol, hal itu akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk munculnya wacana yang lebih tajam tentang isu gender. Dan karena Islam tak mengenal hirarki keagamaan seperti Katolik, maka pluralitas pandangan tentang isu gender ini akan sangat beragam sekali. Dalam Islam akan ada lembaga yang sangat liberal sekali dalam isu gender dan akan ada lembaga yang sangat konservatif sekali.

**R : Bagaimana Anda melihat pergulatan isu gender di kalangan ormas-ormas Islam, seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiah, KOHATI, dan lain-lain?**

B : Saya pikir, itu tergantung pemimpinnya. Sejauh pemimpinnya memiliki kepekaan gender yang baik, biasanya akan tumbuh program-program yang berwawasan gender. KOHATI, misalnya, sekarang sudah cukup memiliki kesadaran gender. Fatayat, pemimpinnya sudah sangat berwawasan gender. Di Muhammadiyah ada *Ruhaini*, satu-satunya perempuan yang masuk di *Majlis Tarjih*, dan pertama kali dalam sejarah Muhammadiyah.

**R : Dari hasil pengamatan sekilas, bisa dikatakan bahwa perkembangan isu gender di NU relatif lebih pesat daripada di Muhammadiyah. Hal itu terlihat dari program-program di lembaga-lembaga NU yang banyak mengusung isu-isu gender. Bagaimana anda melihat fenomena itu?**

B : Ini ada hubungannya dengan faktor liberalisasi di NU yang sangat luar biasa. Pemikiran yang 'aneh-aneh', sekarang ini berkembang di kalangan muda NU. Beberapa waktu yang lalu, *Ahmad Baso* (seorang tokoh muda NU) bicara tentang pemikiran *Al-Jabiri* di *Paradise*. Kita terpesona ketika *Baso*, misalnya, mampu menunjukkan betapa *Al-Jabiri* adalah pemikir Islam yang paling kuat daya kritisnya terhadap tradisi Islam.

Jadi liberalisasi pemikiran keislaman yang sangat kuat di NU menjadi faktor yang membuat isu gender—dan isu Islam lainnya—menjadi lebih cepat berkembang di NU daripada di Muhammadiyah.

Agen-agen perubahan sosial di NU juga banyak. Apalagi, 'masyarakat' NU juga punya komunitas, misalnya P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang telah banyak menghasilkan karya

dan pelatihan gender yang sangat intensif. *Training* itu diberikan kepada kyai-kyai, nyai-nyai, ustadz—pokoknya elit pesantren, termasuk elit perempuan—di lingkungan kecamatan yang jauh di pelosok. Argumentasi tradisional yang digunakan P3M menyebabkan mereka lebih bisa menghindarkan stigma tentang gender, dibandingkan dengan orang yang loncat keisu-isu feminisme kontemporer. Suasana seperti itu tidak ada di Muhammadiyah, walau sekarang Muhammadiyah sudah mulai memasuki isu itu.

Mungkin agak terlambat di Muhammadiyah, tapi hadirnya figur seperti *Ruhaini Dzuhayatin* di *Majlis Tarjih*, akan membuat isu tersebut terus dibicarakan. Hadirnya orang seperti *M. Amin Abdullah* juga sangat berarti karena ia memberi dukungan terhadap orang-orang seperti *Ruhaini*.

Di Muhammadiyah, persoalannya adalah bagaimana memasukan isu gender dalam program-programnya atau melakukan *training* gender sebagai prasyarat anggota baru, atau menyelundupkan isu gender dalam salah satu materi sehingga kemudian terbersit

istilah sensitif gender. Hal ini akan membuka suatu peluang untuk membuka tumbuhnya kesadaran baru tentang gender di sana.

**R : Ada kelompok Islam tertentu yang bersikap tidak apresiatif terhadap tafsir baru tentang isu gender dalam Islam, seperti isu qowwam, poligami, dan lain-lain. Sebagian pengamat menyebut mereka sebagai 'revivalis'. Sesungguhnya bagaimana Anda melihat tarik-menarik yang terjadi dalam kedua kelompok ini?**

B : Sebenarnya, tarik-menariknya bukan terjadi dengan kaum *revivalis*, tapi dengan kalangan tradisionalis. Paradigmnya berbeda meski berangkat dari al-Qur'an yang sama. Persoalannya adalah apakah mungkin dari satu al-Qur'an muncul dua pandangan yang berbeda?

Kalangan feminis menyadari bahwa dari satu teks akan lahir beberapa penafsiran, yang disebut tafsir. Sementara itu, *revivalis* tidak mengakuinya. Mereka melihat al-Qur'an sebagai representasi kebenaran. Membacanya berarti membaca kebenaran. Tak ada kompromi dalam hal itu. Berbeda lagi dengan kalangan tradisionalis. Mereka melihat hal itu merupakan bentuk eksperimen kehidupan yang sangat kaya, yang terpelihara dalam *khazanah* mereka dengan baik. Karenanya, dalam hal ini, NU lebih kaya dari Muhammadiyah. Dalam *khazanah* tersebut akan ditemukan konservatisme yang *ndak* ketulungan, tapi juga akan bisa memunculkan pemikiran yang terbuka, yang lebih liberal.

liberalisasi pemikiran keislaman yang sangat kuat di NU menjadi faktor yang membuat isu gender—dan isu Islam lainnya—menjadi lebih cepat berkembang di NU daripada di Muhammadiyah.

Namun saya melihat bahwa liberalisasi yang terjadi di NU tetap pada batas-batasnya. *Masdar* boleh terus-menerus berusaha mencari sekuat tenaga dasar-dasar *ushuliyah* untuk isu gender, tapi tetap ada ketentuan tertentu yang tak boleh dilewati. Hal penting lain adalah bagaimana kita berefleksi tentang isu gender dalam dialog antar agama. Ini masih sangat kurang dilakukan, meski akhir-akhir ini saya lihat itu sudah dirintis oleh *Kapal Perempuan*, sebuah LSM perempuan di Jakarta. Itu eksperimen besar karena setiap agama punya isu yang berbeda. Kristen, misalnya, punya isu yang unik dan tak ada dalam Islam. Dalam Kristen penamaan Allah mempunyai implikasi gender yang jelas sekali karena representasi Tuhan itu adalah bapak, bukan ibu. Ini bisa dipertanyakan terus.

**R: Terakhir, bagaimana Anda melihat peran lembaga donor dalam mensosialisasikan wacana gender di kalangan Islam di Indonesia?**

B: *Funding* membantu menyuburkan semuanya karena mereka punya misi liberalisasi yang akan memberi kesempatan untuk perdagangan bebas. Kalau bicara

ideologi, liberalisasi merupakan bagian dari faham kapitalisme. Pluralisme juga sebenarnya isu kapitalisme. Itu yang tidak disukai orang-orang *Marxis*. Mereka berasumsi kalau keadilan sudah diwujudkan dalam masyarakat, apalagi masyarakat tanpa kelas, maka dengan sendirinya semua masalah yang dimunculkan akibat ketidaksetaraan akan teratasi. *Classless society* akan memunculkan *genderless society*. Itu cara feminisme *Marxis* berfikir. Tapi itu kan terlalu besar, terlalu global.

Menurut saya ada bagian-bagian dari kehidupan yang tidak usah dihubungkan dengan kapitalisme atau ideologi-ideologi besar. Ini menyangkut faham kebebasan, hak-hak sebagai manusia yang manusiawi. *Funding* punya kepentingan global yakni perdagangan bebas. Kita juga punya kepentingan. Jadi, simbiosis mutualisme! Kita tidak ingin masyarakat kita kolot dan tradisional. Saya kira ada pertemuan kepentingan di sini. *Funding* mempunyai peranan yang sangat besar, karena mereka yang memberikan kemungkinan isu ini bisa diadvokasikan dengan lebih besar, dengan lebih semarak.

Kalangan feminis menyadari bahwa dari satu teks akan lahir beberapa penafsiran, yang disebut tafsir. Sementara, revivalis tidak mengakuinya.

## Telah Hadir



Anda aktivis,  
pemerhati perempuan  
atau apapun, baca buku ini.

Buku bisa didapat di **Yayasan Rahima** atau di toko-toko buku terdekat.

Dua buku ini saling melengkapi. Buku Syafiq Hasyim melakukan dekonstruksi fikih perempuan, sedangkan buku KH. Hussein Muhammad justru merekonstruksi fikih perempuan.

**Dr. Nazaruddin Umar**

Banyak sekali pertanyaan yang sudah lama tersimpan di hati saya baru terjawab sekarang berkat tulisan Kiai Hussein yang sistematis dan rasional. Seharusnya buku ini sudah lama beredar.

**Dr. Andree Feillard**

**Rahima**

Jl. Pancoran Timur IIA No. 10 Perdatam  
Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. 021-798 4165 Faks. 021-798 4165  
E-mail: Rahima2000@cbn.net.id



## Perjuangan Perempuan di Masa Rasulullah: Model Panutan Gerakan Perempuan dalam Islam

Oleh: Badriyah Fayumi

*Ketika perempuan di dunia Islam menggeliat menyuarakan haknya, banyak orang merasa tersentak, terutama yang selama ini hidup nyaman dengan sistem patriarki. Yang muncul kemudian adalah resistensi terhadap segala gerakan yang ditengarai menyuarakan hak-hak perempuan. Dari yang menganggap gerakan itu sebagai adopsi Barat, sampai yang menganggap tidak ada dasarnya dalam Islam.*

**M**erunut sejarah Islam sejak zaman klasik sampai sekarang, gerakan perempuan selalu berhadapan dengan arus besar yang tidak menghendaki perubahan akibat gerakan itu. Namun, bukan berarti bahwa gerakan perempuan dalam Islam tidak ada dan tidak diakui agama. Teks-teks suci keagamaan menunjukkan bahwa gerakan perempuan, terutama di awal Islam, memiliki bobot dan pengaruh terhadap rumusan ajaran-ajaran formal keagamaan pada masa Nabi Muhammad Saw.

Sedikit mencoba menguak gerakan perempuan yang terjadi pada masa Rasulullah Saw, untuk membuktikan gerakan perempuan dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, apalagi dianggap tidak berdasar. Tulisan ini menampilkan Rasulullah karena dua hal. *Pertama*, Rasulullah diakui sebagai panutan seluruh umat Islam, baik dalam ucapan, perbuatan, penetapan, sifat maupun sistem nilai yang dibentuknya. Selain itu, generasi sahabat yang hidup semasa Rasulullah diakui secara aklamasi sebagai generasi Islam terbaik. *Kedua*, dinamika gerakan perempuan yang terjadi pada masa sahabat tidak terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ketika peradaban Islam sedang berada di puncak peradaban dunia, di masa *Abbasiyah*. Barulah pada akhir abad kesembilan belas, ketika Islam menyadari keteringgalannya, gerakan perempuan Islam akhirnya muncul. Menyusul kesadaran perlunya kebangkitan Islam pasca kolonialisme.

### Al-Qur'an dan Perjuangan Perempuan

Sebagaimana disinggung sebelumnya, gerakan perempuan memiliki pengaruh langsung terhadap turunnya ajaran-ajaran agama, khususnya yang menyangkut hak-hak perempuan. Al-Qur'an menyatakan dengan sangat jelas pengaruh tersebut. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengakomodir aspirasi perempuan yang turun segera setelah ada suara dari perempuan. Sebagai contoh, ayat 35 Surat *Al-Ahzab* yang secara eksplisit mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan, turun setelah *Ummu Salamah r.a* mempertanyakan pada Nabi mengapa kaum perempuan dalam Al-Qur'an tidak di-

ungkap sebagaimana kaum laki-laki. Tidak lama kemudian, ketika Nabi berkhotbah di atas mimbar, Nabi mengatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan ayat "Orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, dan seterusnya. Kepada mereka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar." Demikian disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dari hadist riwayat *Imam Nasa'i* dan *Ibnu Jarir Abdul Wahid bin Ziyad*.

Al-Qur'an juga merekam peristiwa pertikaian pasangan suami-istri *Khaulha binti Malik bin Tsa'labah* dengan suaminya *Aus bin Shamit*. *Khaulah* mengadu kepada Nabi bahwa suaminya telah men-*zihar*-nya (menyerupakan fisik istri dengan ibunya sehingga si isteri menjadi haram digauli oleh suaminya). Setelah *zihar* itu, sang suami terus memaksanya untuk melakukan hubungan seksual. Namun *Khaulah* selalu bersikeras menolak dengan berbagai cara, sampai suaminya menjauh dari *Khaulah*. Mendengar pengakuan itu, Nabi terdiam. Beberapa saat kemudian, beliau berkata kepada *Khaulah* yang menolak disetubuhi, sekaligus memberikan penjelasan mengenai hukum suaminya yang men-*zihar* isterinya.

Pembelaan Al-Qur'an kepada perempuan juga spontan turun ketika *Abdullah bin Ubayy bin Salul*, gembong kaum munafik, mencoba melacurkan *Mu'adzah* yang hamil. Dan saat melahirkan, anak yang dilahirkan akan ditebus dengan harga mahal oleh *Ubayy*. *Mu'adzah* menolak hal tersebut. Nabi memberikan sebuah pembelaan yang sangat jelas terhadap perempuan seperti *Mu'adzah*. Bagi perempuan yang dipaksa untuk dilacurkan, Allah secara tegas menyatakan bahwa mereka adalah Maha Pengampun dan Pengasih.

Tiga kasus di atas dengan jelas menunjukkan keberanian perempuan menyuarakan haknya telah ada di zaman Nabi. *Ummu Salamah* memperjuangkan hak istri, sementara *Mu'adzah* memperjuangkan hak reproduksinya dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Sekalipun dalam tiga kasus ini mereka kebetulan berbicara sendirian, sesungguhnya mereka





menyuarakan aspirasi perempuan secara umum. Yang perlu kita garis bawahi di sini, keberanian itu muncul karena iklim sosial yang dibentuk Nabi Saw sangat kondusif terhadap problema perempuan, termasuk hal paling pribadi sekalipun.

Kurang lengkap rasanya mengurai perjuangan (baca : gerakan) perempuan Islam pada masa awal tanpa menyinggung dua peristiwa besar yang menunjukkan keteguhan dan kemandirian kaum perempuan dalam menentukan sikap hidupnya. Peristiwa itu adalah *Bai'at an-Nisa'* (*Bai'at* keislaman kaum perempuan) dan Hijrah ke Madinah. Dalam *Bai'at an-Nisa'*, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membai'at dan memintakan ampunan kepada perempuan yang secara sadar datang bersama-sama untuk ber *bai'at*. Untuk menguji kesungguhan kaum perempuan ini, Rasulullah—sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadist *sahih* berdasarkan kesaksian *Umaymah binti Ruqaiqah*, salah seorang perempuan *Anshar* peserta *bai'at*—mengajukan banyak pertanyaan kepada sekelompok yang hendak ber *bai'at* ini. Peristiwa *bai'at* ini terekam dengan gamblang dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 12.

Peristiwa lebih dramatis terjadi juga pada beberapa perempuan yang secara sadar meninggalkan segala kemewahan hidup dan keluarganya yang masih memusuhi Islam untuk ikut *hijrah* ke Madinah bersama Nabi. Menghadapi perempuan teguh seperti ini, lagi-lagi Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menguji keteguhan imannya. Jika benar-benar bulat tekadnya, maka mereka harus dilindungi dari ancaman dan serangan yang mungkin dilakukan keluarganya. *Ummu Habibah*, putri *Abu Sufyan* pembesar *Kuffar* Makkah yang kelak menjadi istri Nabi, merupakan satu di antara para perempuan yang teguh ini. Perjuangan para perempuan yang hijrah meninggalkan keluarganya ini diabadikan dalam surat *Al-Mumtahanah* ayat 10-12.

Rasulullah tidak memonopoli suara perempuan dengan menjadikan agama sebagai senjata

Ilustrasi di atas menunjukkan, sejak awal perempuan Islam sudah memiliki kesadaran kolektif untuk menyatakan sikap hidupnya, walaupun harus berhadapan dengan risiko besar. Meskipun demikian, kesadaran kolektif itu belum terjalin dalam sebuah gerakan perempuan yang sistematis seperti saat ini.

### Al-Hadis dan Perjuangan Perempuan

Meneropong apa yang terjadi dalam gerakan perempuan Islam dalam sejarah, sangat mustahil jika tidak membuka hadis Nabi. Hadis Nabi merupakan bukti otentik atas dinamika yang terjadi di masa itu, termasuk dinamika gerakan perempuan Islam.

Kalau kita melihat hadis Nabi yang berbicara mengenai perempuan, kita temukan bahwa sebagian besar hadis muncul karena ada pertanyaan atau kasus yang dialami perempuan. Seperti masalah relasi suami isteri—baik relasi seksual maupun relasi keseharian, dan bagaimana peran publik dan sosial perempuan, merupakan beberapa bukti betapa inisiatif dan aspirasi perempuan menjadi sebab utama munculnya hadis-hadis tersebut.

Sepintas lalu, proses munculnya ajaran tentang perempuan yang demikian tampaknya meneguhkan anggapan bahwa agama kurang menaruh perhatian pada perempuan. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lain, hal justru itu merupakan fakta betapa agama tidak semena-mena dalam memberikan peraturan menyangkut perempuan. Nabi sebagai pembawa risalah sangat menyadari bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang tidak serta merta memahami seluk-beluk perempuan. Karenanya, beliau perlu mendengar aspirasi perempuan sebelum memberikan satu keputusan agama. Sikap ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kecenderungan sebagian ahli agama yang merasa lebih tahu dan karenanya merasa paling berhak membuat aturan tentang perempuan. Padahal, kalau Rasulullah Saw berkenan, dengan mengatas namakan wahyu Tuhan, semua peraturan bisa dibuat. Namun Rasulullah Saw tidak melakukan hal itu. Beliau tidak memonopoli suara perempuan dengan menjadikan agama sebagai senjata. Sebaliknya, agama ditempatkan Rasulullah sebagai ruang dialog yang bisa mewedahi aspirasi pemeluknya, tidak terkecuali kaum perempuan.

Harus diakui, langkah yang ditempuh Nabi ini merupakan apresiasi besar terhadap keberadaan kaum perempuan. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, mengingat tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup dan kebiasaan mewarisi dan menjadikan

perempuan bak barang tinggalan, menguasai sistem sosial yang berlaku saat itu. Sikap Rasulullah yang akomodatif ini membuat *sahabiyat* (sahabat perempuan Nabi) merasa bebas menyuarakan aspirasinya. Pada gilirannya, situasi ini menyuburkan gerakan perempuan Islam di masa Nabi Saw.

Sejarah mencatat bahwa *majlis ta'lim* untuk perempuan pada masa Nabi telah ada. Dan seperti

disinggung di atas, alasan terbentuknya *majlis ta'lim* ini adalah kebutuhan *sahabiyat* akan ilmu agama sebagaimana sahabat laki-laki. Mereka meminta Nabi untuk menyediakan waktu khusus untuk perempuan karena merasa perhatian Nabi kepada laki-laki lebih besar daripada kepada mereka. Nabi langsung menyetujui keinginan itu.

Persamaan keinginan untuk belajar ini pada gilirannya membuat *sahabiyat* memiliki semacam komunitas bersama. Tercatatlah nama *Asma' binti Yazid*, seorang *sahabiyat* cerdas yang diangkat menjadi juru bicara. Suatu kali di hadapan para sahabat laki-laki, Rasulullah memuji kemampuan *Asma'* ini. Lagi-lagi tema yang diangkat dan mendedahkan pujian Nabi mengenai persamaan hak perempuan dan laki-laki.

Pertanyaan *Asma'* di atas adalah persoalan kolektif yang dikemukakan secara kolektif pula. *Sahabiyat* biasa mengajukan pertanyaan dan mengadakan persoalan mereka di masjid atau dalam suatu forum terbuka. Ini merupakan salah satu cara *sahabiyat* menyampaikan aspirasi perempuan. Cara lain adalah langsung bertanya kepada Nabi secara pribadi, sesekali juga melalui isteri Nabi. Pertanyaan langsung secara pribadi kepada Nabi umumnya dilakukan *sahabiyat* jika persoalannya bersifat spesifik, seperti *istihadhah* atau menyangkut relasi suami istri.

Menyampaikan aspirasi, baik yang bersifat memperjuangkan hak perempuan atau mencari tahu ajaran agama menjadi tradisi yang tumbuh subur di kalangan *sahabiyat*, terutama di kalangan *Anshar*. Tidak heran jika *Ummul Mukminin Aisyiah r.a* memuji

sikap perempuan *Anshar* yang tidak dihalangi rasa malu dalam *tafaqquh fiddin*. *Imam Bukhari* mengabadikan pujian *Aisyiah* menjadi judul bab dalam salah satu bahasan tentang ilmu dalam kitab *Sahih Bukhari-nya*. Sementara *Imam Muslim* menyitir pernyataan itu dalam suatu *hadis mauquf* dalam *Sahih Muslim-nya*.

#### Catatan Penutup

Apa yang dipaparkan ini sesungguhnya belum merekam seluruh peristiwa yang bisa kita sebut sebagai gerakan perempuan Islam di masa awal. Namun demikian, dari berbagai gerakan sejarah yang terekam dalam al-Qur'an dan al-Hadis, kita dapat melihat kecenderungan umum yang sangat menarik. Baik dari sudut perempuan selaku komunitas yang memperjuangkan haknya, maupun dari sudut Nabi selaku pemegang otoritas keagamaan dan kemasyarakatan. Dari sudut perempuan, tampak jelas bahwa hak-hak perempuan itu ada, baik secara kolektif maupun

pribadi. Tanpa itu, sangat mungkin aspirasi perempuan tak terwadahi karena pemegang otoritas kebetulan seorang laki-laki. Dari sudut Nabi, beliau telah memberikan contoh yang sangat ideal mengenai bagaimana seharusnya seorang laki-laki pemegang otoritas mewadahi aspirasi perempuan. Dalam kedudukannya sebagai Nabi yang punya hak penuh mengatur umatnya, Muhammad Saw tidak semena-mena membuat aturan mengenai perempuan dengan mengatasnamakan agama tanpa memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi kaum perempuan. Konfigurasi dari dua sisi yang saling mengisi itupun kemudian membuka kemungkinan perempuan untuk menyuarakan aspirasi kaumnya. Jika sahabat yang merupakan contoh terbaik generasi Islam saja tidak ragu-ragu memperjuangkan hak dan aspirasi mereka, layakkah kita yang hidup di era modern ini tidak berani menyuarakan hak dan aspirasi kita dalam sebuah wadah besar yang bernama gerakan perempuan ?

agama  
ditempatkan  
Rasulullah SAW  
sebagai ruang  
dialog yang bisa  
mewadahi aspirasi  
pemeluknya, tidak  
terkecuali kaum  
perempuan.

#### **Rasulullah berpesan:**

*Agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu.*

*HR at-Turmudzi*

## Ketika Perempuan Iran Merambah Wilayah Sakral

*Apa yang telah dilakukan kaum perempuan Islam Iran untuk menentang ketidakadilan gender yang telah demikian melembaga di negeri itu? Melalui tulisan Azadeh Kian-Thiebaut, berjudul Women's Religious Seminaries in Iran, yang di muat di ISIM News Letter 6/00, kita disuguhkan beberapa fenomena informasi yang menarik. Ada sekilas potret perjuangan perempuan di sana. Perjuangan yang mereka yakini memiliki basis keagamaan yang sah. Redaksi Suara Rahima meramu kembali tulisan Azadeh, 'associate professor' pada bidang Ilmu Politik di Universitas Paris 8 dan peneliti pada CNRS ini, untuk disajikan kepada sidang pembaca yang budiman*

**P**erempuan Islam di Iran terus bergerak. Mereka semakin mengintensifkan berbagai kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Bidang-bidang dimana keterlibatan perempuan tidak dilarang oleh para pemuka agama dan elit politik (berdasar penafsiran mereka terhadap syari'ah). Di samping itu, kaum perempuan juga berupaya meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang agama dan hukum. Dua bidang strategis dimana peran perempuan dimarginalkan dengan merujuk kepada al-Qur'an, hadis, syari'ah (perkataan dan praktik perbuatan yang bersumber dari Nabi dan para Imam) serta tradisi Islam.

Adalah sebuah tantangan bagi perempuan Islam Iran untuk membuka perdebatan, mengkaji dan menafsirkan ulang ajaran Islam yang telah mentradisi dan mengandung bias gender.

### Perlawanan terhadap penafsiran yang dominan

Sejarah masa kini mencatat bahwa kaum perempuan Iran telah menentang pemahaman dominan yang dikemukakan para agamawan yang mereka anggap bias. Mereka juga menggugat masalah hukum yang sangat terkait dengan penafsiran teks-teks keagamaan.

Beberapa bagian dari Kitab UU Hukum Perdata (misalnya hak sepihak kaum laki-laki untuk menceraikan isteri dan berpoligami) yang bersumber dari penafsiran ayat Al-Qur'an, khususnya surat *An-Nisa'* telah dipersoalkan. Dengan mengemukakan penafsiran mereka sendiri, kaum perempuan hendak menegaskan bahwa Islam telah mengakomodasi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan.

Perlu dicatat pula bahwa kaum perempuan yang sudah mendapatkan wawasan keagamaan yang memadai akan menjadi lebih siap dalam menghadapi isu-isu agama. *Payam-I Hajar* dengan editor *Azam Taliqani*, putri almarhum *Ayatollah Mahmoud Taliqani* yang radikal itu merupakan salah satu contoh yang menarik. Di dalam karya ini untuk pertama kalinya telah dipublikasikan sebuah artikel (pada tahun 1992) tentang penolakan legalisasi poligami sekaligus

mengajukan penafsiran baru dari al Qur'an surat *An-Nisa'* :

*"Analisis ayat Al-Qur'an tentang poligami menunjukkan bahwa hak tersebut diperbolehkan secara eksklusif dalam kasus-kasus khusus guna memenuhi kebutuhan sosial dalam rangka perluasan keadilan sosial. Berlawanan dengan zaman kuno, negara modern di zaman sekarang beserta institusi-institusi sosialnya telah dibentuk untuk membantu keluarga yang kekurangan. Maka, tidak ada fungsi sosial untuk melakukan poligami. Dan lagi, kenyataan memperlihatkan pada kita bahwa dorongan kesenanganlah yang lebih memotivasi laki-laki untuk berpoligami bukannya semangat berderma atau beramal."*

Contoh lain yang layak dikemukakan adalah upaya yang telah dilakukan oleh *Nahid Shid*. Ia adalah seorang pengacara yang memiliki latar belakang pendidikan umum maupun agama. Ia telah memprakarsai beberapa amandemen untuk hukum perceraian, khususnya *Ojrat-ol mesl* yang di dalamnya berisi ketentuan bahwa ketika laki-laki mengajukan gugatan cerai maka istrinya dapat meminta ganti-rugi pada suaminya atas segala pekerjaan rumah-tangga yang telah dilakukannya selama pernikahan berlangsung.

*Shid* berpendapat bahwa sebagian besar undang-undang yang berlaku seharusnya bisa diganti karena bukanlah wahyu. Undang-undang hanya mengacu pada perintah sekunder (hadits Nabi, ucapan Sahabat dan para Imam-Red). Uang ganti rugi karena kematian dalam perang adalah salah satu contoh. Undang-undang ini ditetapkan kepada laki-laki karena jasa mereka sebagai prajurit yang membantu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tidak berlaku terhadap kaum perempuan karena mereka tidak terlibat dalam usaha ekspansi Islam. Waktu sudah berubah dan undang-undang seharusnya merefleksikan perubahan ini. Undang-undang yang bersifat diskriminatif seperti di atas tidak dapat berfungsi dalam masyarakat dimana perempuan sudah menjadi dokter bahkan guru besar. Uang ganti rugi seharusnya diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan.

### Melahirkan Perempuan yang *Mujtahid*.

Mobilisasi perempuan melawan berbagai tindakan pelemahan mereka dalam bidang-bidang yang dianggap sakral tidak hanya terbatas pada bidang hukum dan kegiatan reinterpretasi. Kaum perempuan telah berjuang keras untuk melakukan berbagai upaya strategis lainnya.

Menyusul wafatnya *Amin Isfahani*, seorang *mujtahid* perempuan di awal tahun 1980-an, Iran semakin kehilangan ahli agama perempuan. Kondisi ini telah mendorong beberapa pemuka agama perempuan untuk mendirikan sekolah tinggi agama khusus untuk perempuan. Mereka percaya akan pentingnya upaya mengadakan pelatihan bagi perempuan di bidang-bidang yang relevan melalui lembaga pendidikan tersebut. Diharapkan salah satu implikasi dari usaha ini adalah kemandirian perempuan dalam urusan keagamaan. Perempuan bisa menjadi *mujtahid* yang berwibawa.

Dalam kerangka ini, berdasarkan data yang diperoleh, semakin banyak kaum perempuan muda termasuk mahasiswa dan pelajar sekolah menengah yang membutuhkan pelatihan keagamaan. Banyak diantaranya yang mendaftarkan diri ke sekolah-sekolah agama. Pada tahun 1996, dari 62.731 murid di sekolah agama, 9.995 (16%) adalah perempuan, 34% berusia antara 20-24 tahun dan 20% antara 15-19 tahun. Hampir 90 % dari perempuan tersebut bertempat tinggal di wilayah perkotaan.

Sekolah agama pertama didirikan di Qom pada tahun 1972 oleh *Fatemeh Amini*. Berkat dukungan almarhum *Ayatullah Kasim Shari'atmadari*, *Fatemeh* membuat madrasah *at- Tauhid* di Qom. Ia juga mendirikan tiga sekolah tinggi agama lagi disana sebelum pindah ke Teheran. Di kota inilah perempuan yang kini berusia 61 tahun itu mendirikan sekolah tinggi agama *Fatemeh-ye Zahra* pada tahun 1988. Selain melaksanakan kurikulum biasa (seperti sekolah keagamaan yang lain selama masa belajar kurang lebih selama empat tahun), lembaga pendidikan ini juga menawarkan kursus kesehatan masyarakat, ekologi, pengelolaan rumah tangga, dan lain lain. Semua materi diajarkan oleh professor dari universitas

*"Adapun tujuan mendirikan sekolah tinggi Fatemeh-ye Zahra adalah untuk mendidik mujtahid perempuan agar mampu menemukan solusi atas masalah perempuan, termasuk problem sosial mereka. Kami berupaya memberikan kontribusi kepada pengembangan perempuan dengan memberikan dorongan pada kreativitas mereka. Dengan demikian semoga akan meningkatkan harga diri mereka." Ujar Fatemeh.*

Masyarakat memerlukan *mujtahid* perempuan



Sumber: Iran online

sebagaimana mereka memerlukan dokter dan insinyur perempuan. Tetapi ada kendala serius yang dihadapi kaum perempuan untuk mencapai posisi itu. Di satu sisi kaum perempuan umumnya kurang percaya diri. Mereka belum menyadari secara penuh betapa potensi yang dimilikinya. Di sisi lain, tak begitu banyak orang bersedia membantu usaha memajukan kaum perempuan, baik secara moral maupun finansial. Lelaki juga tampaknya belum siap menerima perempuan yang tampil penuh percaya diri.

*Fatemeh* berkeyakinan bahwa berdasarkan ajaran al-Qur'an, posisi laki-laki dan perempuan itu setara. Oleh karenanya, keberadaan *mujtahid* perempuan adalah sesuatu yang harus didukung. Untuk itulah sekolah agama perempuan selayaknya ditumbuh-kembangkan.

Selain memberikan pelatihan bagi perempuan, para *mujtahid Sekolah Tinggi Agama Fatemeh-ye Zahra* juga melakukan serangkaian usaha untuk mendukung kaum perempuan yang tidak mampu secara finansial maupun moral untuk memperkuat aktivitasnya di lingkungan publik. Sekolah ini menetapkan sistem kredit dengan cara mengumpulkan dana dari para dermawan yang saleh dan memberikan pinjaman bebas bunga kepada kaum miskin.

Dengan mempertanyakan peran dan identitas gender tradisional serta memperjuangkan kesetaraan hak, kaum perempuan Islam di Iran telah ikut serta mengkonstruksi model keberagaman mereka sendiri. Dengan cara itulah kaum perempuan berupaya memperoleh otonomi ketika berhadapan dengan kewenangan religius yang masih dikuasai kaum laki-laki.

## Suami Melarang Saya Bekerja

### Pertanyaan:

Saya, Nur'aini (34 tahun) telah menikah dengan R (36 tahun) selama 8 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Di rumah, saya merupakan pencari nafkah utama keluarga karena suami tak punya penghasilan tetap. Suami saya mencoba berwiraswasta tapi sering gagal. Awalnya kehidupan keluarga kami baik-baik saja karena penghasilan saya mencukupi dan suami tak masalah kalau saya berpenghasilan lebih besar. Kira-kira dua tahun yang lalu suami saya ikut sebuah kelompok pengajian yang diadakan dekat mesjid rumah kami. Suami saya mendadak menjadi saleh dan membuat suasana rumah menjadi 'Islami'. Saya sekarang memakai jilbab dan anak-anak diharuskan melaksanakan aturan-aturan agama dengan ketat. Persoalan timbul ketika suami melarang saya bekerja karena agama mewajibkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Hal ini sangat membuat saya gundah. Saya takut melanggar aturan agama tapi saya juga tak ingin kondisi keuangan kami goyah karena pekerjaan suami yang tak menentu. Suami meminta saya untuk tawakal saja karena rezeki Allah yang menjamin. Bagaimana tanggapan RAHIMA terhadap kasus yang saya alami ini? Apa yang saya lakukan supaya rumah tangga kami tetap kokoh tanpa harus melanggar aturan agama?

(Nur'aini, Depok)

### Jawaban :

Saya ikut merasa prihatin dengan kasus yang terjadi pada diri Ibu. Kasus seperti ini sering terjadi pada masyarakat kita yang saat ini sedang dilanda krisis mental, moral, ekonomi, politik dan sosial. Ketika dihadapkan pada permasalahan tersebut, masyarakat menjadi tidak sabar dan tidak siap untuk menerima perbedaan pandangan (*ikhtilaf*). Mereka sering menginginkan jawaban (baca : penyelesaian) yang tunggal, simpel dan instan dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Seperti pada kasus yang terjadi pada Ibu. Sebatas pengetahuan, saya tidak menemukan satu ayatpun yang melarang siapapun (laki-laki atau perempuan) untuk bekerja, baik di dalam ataupun di luar rumah. Dalam surat *al-Nahl*, ayat 97 disebutkan secara tegas bahwa untuk menciptakan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dipersyaratkan peran aktif setiap orang beriman, lelaki dan perempuan (*secara eksplisit disebutkan lelaki dan perempuan*), tentu dengan melakukan aktifitas-aktifitas yang positif (*amalan shalihan*). Di dalam surat *al-Qashash*, ayat-23-28, juga dikisahkan mengenai dua puteri Nabi Syu'aib as yang bekerja menggembala kambing di padang rumput, yang kemudian bertemu

dengan Nabi Musa as. Surat *al-Naml* ayat 20-44, juga mengapresiasi kepemimpinan (karir politik) seorang perempuan yang bernama *Balqis*. Disamping ayat-ayat lain yang mengisyaratkan bahwa perempuan itu boleh bekerja menyusukan anak dan memintal benang.

Dalam praktek kehidupan zaman Nabi Saw, banyak riwayat menyebutkan, beberapa sahabat perempuan bekerja di dalam dan di luar rumah, baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebutlah misalnya, *Asma bint Abu Bakr*, isteri sahabat *Zubair bin Awwam*, bekerja bercocok tanam, yang terkadang melakukan perjalanan cukup jauh. Di dalam kitab hadits (*Shahih Muslim*, juz II, halaman 1211, nomor hadits 1483) disebutkan bahwa ketika *Bibi Jabir bin Abdullah* keluar rumah untuk bekerja memetik kurma, dia dihardik oleh seseorang untuk tidak keluar rumah. Kemudian dia melapor kepada Nabi Saw, yang dengan tegas mengatakan kepadanya: "Petiklah kurma itu, selama untuk kebaikan dan kemaslahatan".

Di dalam literatur *fikih* (jurisprudensi Islam) juga secara umum tidak ditemukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Variasi pandangan ulama hanya muncul pada kasus seorang isteri yang bekerja tanpa restu dari suaminya. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah: apakah seorang isteri yang bekerja tanpa restu suami dianggap melanggar peraturan agama?

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara sederhana, karena beberapa hal yang melatarinya (*al-qara'in*) harus diperhatikan. Yang pasti, jawaban (fatwa agama) apapun yang diberikan adalah tidak sepenuhnya murni agama (*'ubudiyah mahdlah*) yang tidak bisa ditawar-tawar, tetapi lebih kepada persoalan pribadi (*al-ahwal al-syakhshiyah*) yang label hukumnya (*al-washf al-syar'i*) banyak didasarkan kepada berbagai hal yang melatari subjek pelakunya. Salah satu indikasinya adalah bahwa apa yang dianggap pelanggaran agama (dalam kasus tersebut) dianggap selesai (tidak melanggar) bagi *fikih*, apabila misalnya kemudian suami tidak mempermasalahkan sang isteri untuk bekerja.

Kalau lebih jauh menelusuri lembaran-lembaran literatur *fikih*, dalam pandangan banyak ulama *fikih*, suami juga tidak berhak sama sekali untuk melarang isteri bekerja mencari nafkah, apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lain (*lihat fatwa Ibn Hajar*, juz IV, h. 205 dan *al-Mughni li Ibn Qudamah*, juz VII, h. 573).

Lebih tegas lagi dalam *fikih Hambali*, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima

Ada banyak kisi yang terhimpun dalam sebuah arus besar bernama gerakan perempuan Islam. Ada beragam kelompok, corak ideologi, strategi, isu dan rumpun aktifitas. Berikut ini kami suguhkan tiga karakteristik dari lautan keberagaman itu.

## LSM PEREMPUAN DI KANTONG NU

NU dikenal dekat dengan LSM. Di Yogya bahkan ada LSM perempuan di kantong NU, yaitu Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF). Lembaga yang didirikan 10 tahun lalu oleh beberapa aktivis Fatayat NU Yogyakarta, dikenal karena program menentang ketidakadilan gender dalam lingkungan agama. YKF menggunakan strategi pelayanan dan pendidikan dalam mensosialisasikan gagasannya.

Kegiatan yang bersifat layanan meliputi operasionalisasi Rumah Bersalin Handayani dan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi remaja dan keluarga. Untuk kegiatan konseling, YKF bekerja sama dengan PKBI dan BKKBN Gunung Kidul. Program layanan

*Sambungan Tanya Jawab*

calon isterinya sebagai pekerja (baca : Perempuan Karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja, suami tidak boleh kemudian melarang isterinya bekerja atas alasan apapun (lihat : *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, juz VII, h. 795).

Dalam kasus Ibu (seorang isteri bekerja karena suami tidak memperoleh pekerjaan yang bisa menutup kebutuhan keluarga), yang justru dianggap melanggar aturan agama adalah suami (setidaknya dalam pandangan *Ibn Hajar dan Ibn Qudamah*). Pertama karena tidak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua karena melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi olehnya. Apalagi kalau suami Ibu sejak sebelum kawin, bersedia untuk menerima Ibu bekerja atau berkarir (pandangan fikih *Hambali*). Fikih juga membenarkan suami dan isteri, keduanya bekerja, tentu dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Berarti, fikih tidak memandang bahwa kewajiban seorang lelaki (misalnya suami) untuk mencari nafkah menjadi penghalang bagi perempuan untuk bekerja, sehingga ia sama sekali tidak bisa dijadikan alasan bagi pelarangan agama terhadap perempuan bekerja. Tawakkal kepada Allah SWT juga tidak bisa dijadikan alasan pelarangan (isteri) bekerja. Karena konsep *tawakkal* dalam Islam adalah "*I'qil fatawakkal*", atau ikatlah unta itu kemudian baru bertawakkal. Hadits ini dinyatakan ketika seorang sahabat masuk ke dalam

ini kedepannya akan dikembangkan menjadi Pusat Kesehatan Perempuan dan Anak (PKPA).

Kegiatan yang bersifat pendidikan meliputi dua isu besar yaitu hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan. Program hak-hak politik perempuan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan penyusunan kurikulum '*fiqh siyasah*' di pesantren Jawa. Kegiatan ini juga meliputi penyadaran gender bagi kalangan muda NU dalam bentuk pelatihan, kajian intensif dan dialog ke kelompok-kelompok strategis. Penguatan hak-hak reproduksi perempuan terimplementasikan dalam *workshop* dan kajian rutin bagi *badal* (pengganti) Kiyai/Nyai pesantren Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan ini juga meliputi penerbitan hasil kajian dalam bentuk buku saku, penerbitan *news letter*, novel dan sandiwara radio berbahasa Jawa sebagai media kampanye tentang hak-hak reproduksi perempuan.

Dalam mengembangkan jaringan, YKF tidak membedakan golongan atau kelompok manapun selama mengusung niat yang sama yaitu pemberdayaan perempuan. Menurut YKF, gerakan pemberdayaan perempuan Islam di Indonesia belum solid dan masih bersifat insidental. Karena itu perlu dirumuskan suatu garis yang jelas serta tujuan dan indikator yang akan dicapai. (Nef) ●

mesjid dan membiarkan untanya tidak terikat di luar. Nabi bertanya : Mengapa?. Dijawab : Saya bertawakkal kepada Allah SWT. Kemudian Nabi menyatakan : Bukan demikian *tawakkal* itu, ikatlah untamu itu, lalu bertawakkal.

Berarti dalam pandangan agama (fikih), Ibu boleh terus bekerja tanpa ada perasaan melanggar aturan agama, karena memang sama sekali tidak melanggar. Hanya, karena persoalan ini lebih kepada persoalan pribadi (*private matters*), maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Ibu sendiri dan suami. Artinya, Ibu harus pandai-pandai mengkomunikasikan persoalan ini terhadap suami dengan mengacu pada *kemaslahatan* dan kebaikan bersama. Ini yang mungkin justru yang lebih sulit. Coba Ibu mengajak suami mendiskusikan persoalan ini, dari hati ke hati, dalam kondisi yang akrab, mesra dan kalau bisa romantis. Sebelumnya, saya sarankan agar Ibu membaca buku-buku fikih keluarga yang agak komprehensif, terutama yang punya muatan pembelaan terhadap perempuan (sadar gender). Seperti *Hak-Hak reproduksi perempuan dalam Islam* (Masdar F. Mas'udi), *Menakar Harga Perempuan dalam Islam* (Syafiq Hasyim), dan terakhir Fikih Perempuan (KH Husein Muhammad). Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Dari sini saya do'akan semoga Ibu berhasil, sehingga keluarga Ibu tetap harmonis. Amin.

**Faqihuddin Abdul Kodir.**

Ada banyak kisi yang terhimpun dalam sebuah arus besar bernama gerakan perempuan Islam. Ada beragam kelompok, corak ideologi, strategi, isu dan rumpun aktifitas. Berikut ini kami suguhkan tiga karakteristik dari lautan keberagaman itu.

## LSM PEREMPUAN DI KANTONG NU

NU dikenal dekat dengan LSM. Di Yogya bahkan ada LSM perempuan di kantong NU, yaitu Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF). Lembaga yang didirikan 10 tahun lalu oleh beberapa aktivis Fatayat NU Yogyakarta, dikenal karena program menentang ketidakadilan gender dalam lingkungan agama. YKF menggunakan strategi pelayanan dan pendidikan dalam mensosialisasikan gagasannya.

Kegiatan yang bersifat layanan meliputi operasionalisasi Rumah Bersalin Handayani dan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi remaja dan keluarga. Untuk kegiatan konseling, YKF bekerja sama dengan PKBI dan BKKBN Gunung Kidul. Program layanan

### Sambungan Tanya Jawab

calon isterinya sebagai pekerja (baca : Perempuan Karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja, suami tidak boleh kemudian melarang isterinya bekerja atas alasan apapun (lihat : *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, juz VII, h. 795).

Dalam kasus Ibu (seorang isteri bekerja karena suami tidak memperoleh pekerjaan yang bisa menutup kebutuhan keluarga), yang justru dianggap melanggar aturan agama adalah suami (setidaknya dalam pandangan *Ibn Hajar dan Ibn Qudamah*). Pertama karena tidak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua karena melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi olehnya. Apalagi kalau suami Ibu sejak sebelum kawin, bersedia untuk menerima Ibu bekerja atau berkarir (pandangan fikih *Hambali*). Fikih juga membenarkan suami dan isteri, keduanya bekerja, tentu dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Berarti, fikih tidak memandang bahwa kewajiban seorang lelaki (misalnya suami) untuk mencari nafkah menjadi penghalang bagi perempuan untuk bekerja, sehingga ia sama sekali tidak bisa dijadikan alasan bagi pelarangan agama terhadap perempuan bekerja. Tawakkal kepada Allah SWT juga tidak bisa dijadikan alasan pelarangan (isteri) bekerja. Karena konsep *tawakkal* dalam Islam adalah "*Iqil fatawakkal*", atau ikatlah unta itu kemudian baru bertawakkal. Hadits ini dinyatakan ketika seorang sahabat masuk ke dalam

ini kedepannya akan dikembangkan menjadi Pusat Kesehatan Perempuan dan Anak (PKPA).

Kegiatan yang bersifat pendidikan meliputi dua isu besar yaitu hak-hak politik dan hak-hak reproduksi perempuan. Program hak-hak politik perempuan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan penyusunan kurikulum "*fiqh siyasah*" di pesantren Jawa. Kegiatan ini juga meliputi penyadaran gender bagi kalangan muda NU dalam bentuk pelatihan, kajian intensif dan dialog ke kelompok-kelompok strategis. Penguatan hak-hak reproduksi perempuan terimplementasikan dalam *workshop* dan kajian rutin bagi *badal* (pengganti) Kiyai/Nyai pesantren Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan ini juga meliputi penerbitan hasil kajian dalam bentuk buku saku, penerbitan *news letter*, novel dan sandiwara radio berbahasa Jawa sebagai media kampanye tentang hak-hak reproduksi perempuan.

Dalam mengembangkan jaringan, YKF tidak membedakan golongan atau kelompok manapun selama mengusung niat yang sama yaitu pemberdayaan perempuan. Menurut YKF, gerakan pemberdayaan perempuan Islam di Indonesia belum solid dan masih bersifat insidental. Karena itu perlu dirumuskan suatu garis yang jelas serta tujuan dan indikator yang akan dicapai. (Nef) ●

mesjid dan membiarkan untanya tidak terikat di luar. Nabi bertanya : Mengapa?. Dijawab : Saya bertawakkal kepada Allah SWT. Kemudian Nabi menyatakan : Bukan demikian *tawakkal* itu, ikatlah untamu itu, lalu bertawakkal.

Berarti dalam pandangan agama (fikih), Ibu boleh terus bekerja tanpa harus ada perasaan melanggar aturan agama, karena memang sama sekali tidak melanggar. Hanya, karena persoalan ini lebih kepada persoalan pribadi (*private matters*), maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Ibu sendiri dan suami. Artinya, Ibu harus pandai-pandai mengkomunikasikan persoalan ini terhadap suami dengan mengacu pada *kemaslahatan* dan kebaikan bersama. Ini yang mungkin justru yang lebih sulit. Coba Ibu mengajak suami mendiskusikan persoalan ini, dari hati ke hati, dalam kondisi yang akrab, mesra dan kalau bisa romantis. Sebelumnya, saya sarankan agar Ibu membaca buku-buku fikih keluarga yang agak komprehensif, terutama yang punya muatan pembelaan terhadap perempuan (sadar gender). Seperti *Hak-Hak reproduksi perempuan dalam Islam* (Masdar F. Mas'udi), *Menakar Harga Perempuan dalam Islam* (Syafiq Hasyim), dan terakhir *Fikih Perempuan* (KH Husein Muhammad). Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Dari sini saya do'akan semoga Ibu berhasil, sehingga keluarga Ibu tetap harmonis. Amin.

**Faqihuddin Abdul Kodir.**

## JILBAB DAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh diantaranya ditandai dengan penerapan kewajiban mengenakan jilbab bagi kaum perempuan di Aceh. Rakyat biasa, pegawai negeri sipil ataupun aparat kepolisian, muslim maupun non muslim. Walhasil, setiap perempuan di Aceh wajib mengenakan jilbab. Pihak alim ulama Aceh maupun dari pihak GAM menyerukan kewajiban berjilbab ini untuk dipatuhi kaum perempuan di sana.

Oleh sebagian warga, seruan para alim ulama ini seringkali diterjemahkan sebagai perintah absolut bagi kaum perempuan untuk mengenakan jilbab.

Perintah ini sering diikuti dengan razia jilbab di beberapa tempat dengan cara menyobek pakaian ketat, memotong rambut secara paksa bahkan menggundulinya. Pelaku tindak kekerasan ini berasal dari kalangan masyarakat biasa, sipil, ataupun oknum militer. Beberapa surat kabar yang terbit tahun 1999 sempat menurunkan beberapa berita mengenai razia jilbab ini. *Serambi Indonesia* (6/9) menurunkan judul *Razia Jilbab di Blangpidie : Tiga Wanita Dipangkas Paksa*. *Serambi Indonesia* (29/4) menurunkan berita berjudul *AGAM Akui Desak Wanita Berjilbab*. *Harian Suara Bangsa* (24/4) menurunkan berita berjudul *Tentara Liar Merazia Wanita di Aceh Utara*. *Harian Serambi Indonesia* (5/5) menurunkan berita dengan judul *Hentikan Kekerasan dalam Razia Jilbab : Di Aceh Timur Tujuh Wanita Digunduli*. Berita-berita tersebut terkesan menampilkan wajah Islam yang dekat dengan kekerasan.

Praktik-praktik seperti ini sebenarnya disesalkan oleh beberapa pemuka masyarakat Aceh sendiri. Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah *Dr.T. Iskandar Dawoed, SE*, ketika membuka seminar *Adab Berbusana Menyambut Syariah Islam* menyatakan pada pentingnya kesadaran. Meskipun secara tersirat ia mengharapkan agar para mahasiswanya berbusana sesuai dengan ajaran Islam, ia lebih menekankan pada kesadaran. *"Yang kami harapkan adalah kesadaran. Bukan karena adanya sanksi. Dan masyarakat di luar kampus akan selalu melihat bagaimana kita disini. Maka, waspadalah."*

Lebih jauh harapan yang dikemukakan oleh *Erni*, seorang aktivis gerakan perempuan dari Divisi Advokasi

Perempuan Flower Aceh yang ditulis dalam harian *Serambi Indonesia* (5/10 1999). Sosialisasi berbusana muslim hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih simpatik dan bertanggungjawab dengan menjauhi cara-cara kekerasan. Praktik-praktik seperti itu dapat disalahgunakan untuk pembenaran (justifikasi) tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik kepada mereka yang muslim maupun non muslim. (Ning) •

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ALA UMMI

Salah satu majalah perempuan Islam yang banyak dibaca saat ini adalah majalah *UMMI*. Media yang dibidani oleh beberapa mahasiswa UI pada tahun 1989 sekarang terbit dengan tirsas 85.000 eksemplar. Dari angket yang dilakukan *UMMI* pada bulan Maret tahun 2000, 95,6 % pembacanya adalah perempuan dengan tingkat pendidikan PT (52,7 %), SMU (39,9%) dan sebagian besar berstatus belum menikah (73,3 %).

Apa kekuatan *UMMI* ? Menurut *Dwi Septiawati* – Pemimpin Redaksi *UMMI*- sejak awal *UMMI concern* pada pemberdayaan perempuan. Menurutnya, perempuan merupakan separo lebih dari jumlah populasi penduduk Indonesia dan pengaruh mereka sangat kuat dalam membentuk sebuah masyarakat yang baik. Untuk itu *UMMI* mengemban tugas sebagai media akselerator dan dinamisator bagi terbentuknya karakter perempuan *shalihah (mar'atus sholihah)*, isteri yang taat dan mulia (*zaujah muthi'ah wa karimah*) dan ibu pendidik (*ummu madrosah*). Identitas Perempuan Islami adalah motto yang menjadi *brand image* *UMMI*.

Yang menarik, media yang pada awalnya dibidani kaum adam ini sekarang sepenuhnya dikelola perempuan. Menurut *Septi*, semua ini bukan semata-mata perjuangan gender tapi lebih pada memberi kesempatan dan ruang yang lebih luas kepada perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya untuk kemashalatan keluarga dan umatnya. Karenanya *UMMI* merancang jam kerja dan aturan sedemikian rupa agar mereka cukup punya waktu untuk menjalani peran-peran femininnya sebagai isteri dan ibu di rumahnya, termasuk menjadi ibu masyarakat dan bangsa. (Nef) •



## Peluncuran Buku Dekonstruksi dan Rekonstruksi Fiqh Perempuan

**S**elama ini, ada anggapan bahwa karya-karya ilmiah dan teoritis hanya dilahirkan kalangan perguruan tinggi. Kenyataannya, dalam beberapa waktu terakhir banyak buku-buku, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, dilahirkan kalangan LSM yang dianggap hanya bergerak ditataran praktis.

Hal itu diungkapkan *Nazaruddin Umar* dalam acara peluncuran buku "Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender" karya *KH. Husein Muhammad* dan buku "Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam" karya *Syafiq Hasyim*, yang diselenggarakan oleh RAHIMA di Jakarta Media Center pada tanggal 28 April 2001.

Peluncuran buku yang dihadiri oleh berbagai LSM, organisasi massa, organisasi kemahasiswaan dan pengamat perempuan tersebut, dibuka dengan acara *happening art* group CANTIKA, asuhan *Nani Buntarian*, yang mengilustrasikan perjuangan perempuan meruntuhkan benteng patriarki yang ditemukan dalam teks-teks keagamaan. Dalam kata pengantarnya, ketua Yayasan RAHIMA, *KH. Muhyiddin Abdussomad*, menyatakan bahwa dua buku yang diluncurkan pada hari tersebut merupakan upaya pemberdayaan perempuan melalui penyebaran wacana keagamaan yang berperspektif gender.

Menurut salah satu penulis, *KH. Hussein Muhammad*, bukunya terlahir karena keprihatinannya terhadap reduksi besar-besaran yang terjadi dalam pemikiran Islam terutama yang berhubungan dengan soal-soal keperempuanan. Padahal, ide dasar Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Menurut *Syafiq Hasyim*, penulis buku yang lain, reduksi pemikiran Islam tentang perempuan, terutama fikih, terjadi karena kebutuhan kekuasaan. Ia mencontohkan bagaimana kepentingan elit politik sangat mempengaruhi fluktuasi karya-karya fikih tentang kepemimpinan perempuan. Karenanya, karyanya yang sangat menggugat fikih patriarkis yang selama ini sangat dominan dalam masyarakat Islam.

Dalam acara peluncuran buku yang merupakan hasil kerja sama RAHIMA dengan *Ford Foundation*, juga diadakan diskusi yang dipandu *Farha Ciciek* dari RAHIMA. Diskusi itu menampilkan *Nazaruddin Umar* dan

*Badriyah Fayumi* sebagai pembahas, serta *Julia Suryakusuma* dan *Ulil Absar Abdalla* sebagai pembanding. Ada berbagai kesan yang disampaikan para pembicara tentang buku yang dihasilkan aktivis RAHIMA tersebut.

Menurut *Nazaruddin Umar*, karya *Syafiq Hasyim* sangat berbau pemberontakan terhadap isu-isu yang telah mapan dalam tradisi Islam selama ini. *Syafiq* cenderung menyalahkan para *fuqaha* yang melegitimasi kecenderungan *misoginis* dalam fikih Islam. Sayangnya, *Syafiq* tidak menyelesaikan tugasnya. Artinya, buku *Syafiq* sangat berbau dekonstruksi, belum melakukan rekonstruksi, hal yang justru kentara dalam karya *KH. Hussein Muhammad*. "Menariknya, dalam waktu

yang bersamaan lahir buku yang saling melengkapi ini," kata *Nazaruddin*.

*Badriyah Fayumi* melihat karya *KH. Hussein Muhammad* penuh dengan kumpulan serpihan pemikiran ulama berbagai mazhab dalam Islam yang selama ini dianggap sebagai karya pinggir. Justru pada karya-karya yang jarang digunakan itu ditemukan perspektif yang lebih akomodatif terhadap perempuan. Menurut *Ulil Absar Abdalla*, fikih Islam mempunyai spektrum yang luas karena ditemukan banyak sekali mazhab pemikiran yang tergolong standar atau pinggir, seperti yang banyak dikutip *KH. Hussein*. Berbeda dengan pandangan *Syafiq*, *Ulil* menyatakan bahwa perbedaan pendapat yang terdapat dalam fikih Islam justru di tulis di luar tradisi kekuasaan. Jika fikih ditulis di bawah kekuasaan politik, akan sulit ditemukan perbedaan karena kekuasaan cenderung menyerasamakan.

*Julia Suryakusuma* yang mendapat giliran terakhir, menekankan pentingnya strategi membumikan wacana keagamaan yang terdapat dalam kedua buku tersebut. Karya-karya intelektual jangan hanya menjadi semacam kegenitan intelektual untuk mengasah rasio semata, kata *Julia* menambahkan. Perubahan sosial yang lebih berkeadilan gender akan terwujud bila pemikiran keagamaan yang bersifat reflektif, seperti yang terdapat dalam kedua buku tersebut, di sosialisasikan ke masyarakat luas. Selama ini, agama sering tampil dalam bentuk sangar dan penuh ketidakadilan, kata *Julia* menambahkan (Nefi/Ruby)●



## Ketika Perempuan Islam Bicara

**S**iapa bilang sulit mengumpulkan perempuan muslim dari berbagai ideologi dan kelompok untuk berdialog? Pada tanggal 22 maret 2001, RAHIMA mengundang mereka duduk bersama duduk satu meja (roundtable) memperbincangkan gerakan perempuan muslim di Indonesia dengan berbagai problemnya. Hasilnya dapat anda baca dalam laporan kiprah kali ini.

Perempuan-perempuan yang hadir pada pertemuan tersebut mewakili berbagai kelompok Islam seperti Muslimat NU, Naisyatul Aisyiah, Persistri, KOHATI, IMMAWATI, Pusat Studi Wanita IAIN Syarif Hidayatullah, Lembaga Dakwah Kampus, NGO, pers, beberapa lembaga donor dan pemerhati isu dan gerakan perempuan. Selain melakukan pemetaan bersama tentang gerakan perempuan Islam di Indonesia saat ini, pertemuan tersebut dijadikan awal untuk mensosialisasikan tradisi dialog antar mereka.

Dari pertemuan yang dipandu Farha Ciciek dari RAHIMA, terungkap beberapa hal menarik yang terjadi pada gerakan perempuan Islam akhir-akhir ini. Salah satunya adalah komentar yang diungkap oleh Sally White dari The Australian National University. Sally yang tengah melakukan penelitian tentang gerakan perempuan Islam pada masa penjajahan Belanda, melihat bahwa ada dinamika yang berbeda antara organisasi perempuan tempo dulu dengan masa kini. Seiring menguatnya isu gender dalam gerakan perempuan Islam akhir-akhir ini, persoalan struktural yang menghambat ruang dan gerak perempuan, seperti yang ditemukan dalam organisasi massa Islam mulai digugat. Karena persoalan struktural, suara-suara perempuan yang progresif dan revolusioner tidak muncul ke permukaan. Bicara struktur berarti bicara posisi. Dan posisi selalu berhubungan dengan kekuasaan. Karenanya, beberapa organisasi sayap perempuan yang terdapat pada beberapa organisasi mahasiswa Islam seperti Korps-HMI-Wati (KOHATI), Korps-PMII-Puteri (KOPRI) dan IMAWATI (IMM), menuntut posisi-posisi strategis yang lebih menentukan dalam struktur organisasi. (lihat: Riset Redaksi).

Masuknya isu gender ke kalangan perempuan NU, disikapi dengan pengembangan program-program yang tak lagi hanya menekankan pendekatan *welfare*.



Muslimat NU sekarang sudah bicara tentang *women's right* pada bidang hukum dan tafsir keagamaan tentang perempuan. Organisasi perempuan NU telah mengadopsi pola kerja LSM dan banyak mendapat dukungan dari lembaga donor. Hal sebaliknya tak ditemukan dalam organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah agak menjaga jarak dengan lembaga donor dan tak begitu dekat dengan LSM. Itu tak berarti isu gender tak ditemukan di kalangan Muhammadiyah. Dari hasil penelitian LBH APIK yang diungkap Farha Ciciek, LSM perempuan terkemuka di Yogyakarta yakni Rifka Annisa dan Yasanti, sebahagian besar pendirinya berasal dari kalangan Muhammadiyah.

Topik lain yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah urgensi pembaguan tugas dalam gerakan perempuan Islam. Hal tersebut telah mulai diupayakan misalnya melalui kerjasama segitiga antara Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), RAHIMA dan Puan Amal Hayati. Meski mempunyai basis garapan yang sama yakni Pesantren, ketiganya berbeda dalam pembagian kerja. FK3 bergerak dalam bidang wacana keagamaan dengan melakukan kajian kritis dan melakukan interpretasi ulang terhadap teks-teks kitab kuning yang mendiskriminasi perempuan. Gerakan penyadaran publik dilakukan RAHIMA dengan melakukan sosialisasi wacana perempuan yang berperspektif gender melalui pelatihan, seminar dan penerbitan buku. Sementara Puan Amal Hayati (sebuah LSM perempuan) akan mendirikan *women's crisis centre* untuk melakukan tindakan kuratif bagi perempuan korban kekerasan, baik dalam lingkup publik maupun domestik. (Nef/Ruby) ●

**RAHIMA** (Pusat Pelatihan dan Informasi, Islam dan Hak-Hak Perempuan) hadir untuk memenuhi kebutuhan akan upaya pemberdayaan perempuan yang berperspektif Islam di dalam masyarakat. Pemberdayaan ini penting dalam rangka penegakkan hak-hak perempuan.



## Warna-Warni Gerakan Perempuan Islam

Judul	: WANITA DAN GENDER DALAM ISLAM (Akar-akar Historis Perdebatan Modern)
Judul Asli	: WOMEN AND GENDER IN ISLAM : Historical Roots of A Modern Debate
Pengarang	: Leila Ahmed
Penerjemah	: MS. Nasrullah
Penyunting	: Cak Nas
Penerbit	: PT. Lentera Basritama, Jakarta
Tebal	: xx + 339 halaman

Beberapa bagian dalam buku *Leila Ahmad* ini kemungkinan akan mengejutkan Anda. Secara lugas dan komprehensif ia membedah tuntas persoalan kaum perempuan dan ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat Islam. Dimulai dari pra dan pasca “masa kenabian”, masa *Khalifah Umar*, masa dinasti-dinasti Khilafah Islam di Timur Tengah, hingga masa kini perjuangan pembebasan kaum perempuan di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, seperti Mesir, Aljazair, Turki, dan Pakistan.

Berbeda dengan penulis muslim kebanyakan yang selalu menyatakan Islam datang dengan misi “liberasi” (pembebasan), *Leila* justru mengatakan bahwa Islam tidak secara penuh menyokong implementasi hak-hak kaum perempuan. Beberapa contoh misalnya, praktik pemakaian *hijab* di zaman Nabi. Menurutnya, *hijab* lebih bermakna pada pembatasan ruang publik perempuan (para isteri Nabi), padahal sebelumnya mereka justru cukup intens berinteraksi dengan para sahabat. Begitu pula praktik poligami, yang dilakukan oleh Rasulullah, sebuah praktek yang sering mengundang protes isterinya.

Meski demikian, *Leila* juga tidak ketinggalan menyorot otoritas (kewenangan) yang dimiliki oleh para perempuan Arab, sebelum maupun sesudah kehadiran Islam. *Khadjah binti Khuwailid*, misalnya, disinyalir memiliki “perjanjian khusus” dengan Nabi Muhammad. Berkat perjanjian tersebut, perkawinannya dengan Rasulullah merupakan “perkawinan satu-satunya”, se-

lama hayat *Khadjah. Leila* juga mengisahkan, kenyataan larangan “pembunuhan” bayi perempuan, tidak serta merta mengubah dan memperbaiki posisi perempuan dalam segala hal. Bahkan, mengutip *Robertson Smith*, *Leila* menuliskan bahwa Islam justru menggantikan tanaman yang bersifat matriarkal menjadi patriarkal. Sinyalemen ini diperkuat oleh adanya larangan *Umar bin Khatthab* pada kaum perempuan untuk tidak pergi berjama’ah ke masjid, maupun kembalinya sistem *Harem* di Timur Tengah, pada masa *Dinasti Umayyah* dan *Dinasti Abbasiyah*.

Banyak hal yang ditulisnya tentang gerakan perempuan di Mesir. Secara umum ia kategorikan aktivis gerakan perempuan itu menyampaikan pandangan mereka melalui bahasa yang berbeda. *Pertama*, yang menggunakan bahasa dan slogan Barat sebagaimana yang dilakukan oleh *Alifa Rifaat*, *May Ziadah*, *Doria Syafik*, dan lain-lain. *Kedua*, menggunakan tema-tema Islam tentang perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh *Zainab Al Ghazali*.

Ironisnya, cara kaum feminis yang pertama mendapat tantangan yang cukup keras dari penguasa maupun reaksi masyarakat. Akibatnya, ada di antara tokohnya yang sempat mengalami gangguan jiwa bahkan hingga mengambil tindakan bunuh diri. Sementara itu, cara kedua relatif lebih diterima. Selain dianggap tidak bertentangan dengan agama, juga dianggap mampu membangkitkan sentimen nasionalisme mereka.

Yang paling menarik dari paparan *Leila* adalah pernah terjadi suatu masa dimana seluruh kelompok perempuan dapat bersatu dengan bahasa maupun gerakan yang sama. Itu terjadi ketika kaum ber-*pardah*, kaum sekolah, maupun pekerja seks pinggir menginginkan kemerdekaan dan menyatakan perang terhadap segala bentuk intervensi asing dalam kehidupan mereka.

Akhirnya, kita diharapkan melihat secara arif bahwa gerakan perempuan bukanlah suatu gerakan yang sama sekali terpisah dari realitas sosialnya. Ia akan selalu mencari bentuk, sesuai dengan arus perubahan zaman yang dihadapinya. Begitupun Islam, sebenarnya bukanlah sebuah tema yang statis, miskin, dan tertutup untuk menerima setiap bentuk kebajikan. Dari kepingan sejarah masa lalu, kenyataan yang dihadapi masa kini, begitupun harapan-harapan masa mendatang. Melalui buku ini *Leila* mengajarkannya. (ning) ●



# Gerakan Perempuan untuk Cita Kemanusiaan

Oleh : KH. Hussein Muhammad

**K**etika tahta kegelapan berjaya, perempuan telah diperlakukan bahkan bukan sebagai manusia. Mereka dianggap sebagai setan, iblis, *genderuwo*, sarang serigala atau sebutan makhluk lain yang patut disingkirkan dan dikutuk. "Perempuan adalah manusia yang belum selesai, yang tertahan dalam perkembangan tingkat kemanusiaan paling rendah", ujar *Aristoteles*, pemikir berpengaruh sepanjang masa.

Nabi kaum muslimin hadir untuk menghentikan "akidah-akidah" yang sesat dan menyesatkan itu. Sejumlah ayat al Qur-an dibawakannya untuk mendeklarasikan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam segala hal (Q.S.33:35).

Perempuan dan laki-laki saling menolong, untuk saling *amar ma'ruf nahi munkar* (Q.S. 9:71). Perempuan bisa hadir di semua ruang dan waktu laki-laki.

Ketika *Umar bin Khattab* melarang perempuan menetapkan mas kawin terlalu tinggi, seorang perempuan mengangkat tangan untuk melakukan protes politik sambil menyebutkan satu ayat dalam al Qur-an. *Umar* meralat dan menyatakan, "*Perempuan itu benar, Umar salah.*"

Sayang, tidak lama sesudah itu perempuan kembali dipojokkan di sudut-sudut rumah dan terpencil dari keramaian peradaban. Ia kembali menjadi makhluk kelas dua, di "dapurkan" dan disingkirkan dari peran-peran publik.

Kekerasan terhadap perempuan berlangsung kembali, entah sembunyi-sembunyi di balik tembok atau terang-terangan di depan mata. Kemolekan perempuan digadaikan. Dengan mengutip sejumlah teks agama, entah untuk kepentingan apa dan siapa, predikat-predikat itu dibenarkan dan dikukuhkan. Wajah perempuan kembali kelam dan gelap. Dan itu terus berlangsung berabad-abad lamanya sampai kini.

Hari-hari merangkak. Perempuan-perempuan bergerak dan terus bergerak. Mereka menuntut kembali hak-hak kemanusiaannya yang dihilangkan atau dirampas. Ada jutaan perempuan yang terpasung, diperkosa dan mati karena melahirkan. Ada jutaan wajah perempuan yang memar atau mata bengkak, wajah-wajah yang lelah dan memelas, akibat kerja tak pernah henti dan tanpa upah yang berarti.

Ada jutaan perempuan yang masih terbata-bata menega huruf :

"Mengapa kami tidak boleh jadi Presiden, padahal *Balqis* bisa menjadi ratu yang mengagumkan? Mengapa kami tidak boleh jadi jendral, padahal *Aisyah*, isteri nabi, boleh jadi panglima perang?"

"Mengapa hanya kami yang harus mengurus rumah, padahal, kata *Aisyah*, Nabi, di rumahnya melayani keperluan isterinya: menyapu rumah, menjahit baju, memperbaiki sandal, memerah susu, menyiapkan roti dan menggondong cucunya?"

"Omong kosong, jika intelektualitas dan profesionalitas perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ini sama sekali tidak realistik!" begitulah teriakan-teriakan mereka sekarang. Teriakan dan protes itu terus bergaung membahana di mana-mana.

## Kita terpana

Sejumlah argumen kebudayaan kemarin yang digunakan untuk merendahkan perempuan ternyata rapuh oleh realitas kebudayaan baru yang terus bergulir.

Pikiran-pikiran keagamaan (fikih) yang me"rumah"kan dan men"dapur"kan perempuan juga terpatahkan. Pemahaman kita tentang teks-teks keagamaan itu terpaksa harus ditelaah kembali secara kritis. Karena pikiran-pikiran itu masih menjustifikasi budaya kekerasan terhadap perempuan dan masih berkuat pada konteks kebudayaan lama yang meminggirkan mereka. Padahal, pikiran kita tidak bisa terus menerus berada dalam situasi stagnan.

Ketika perempuan diposisikan subordinat dan diasingkan, maka itu berarti kematian peradaban. Kita telah membunuh peradaban, padahal ia sesungguhnya terus berubah dan harus bergerak ke depan, menggapai ide-ide kemanusiaan.

Kita perlu memahami teks dari banyak sudut. Ada sejarah yang berbeda, ada substansi hukum yang telah berubah, ada tradisi yang berganti dan ada "*fasad al zaman*", kerusakan budaya. Semuanya bisa menjadi dasar bagi perubahan kebijakan, keputusan fikih.

Kita wajib mengikuti Nabi Saw. Mengikuti beliau adalah merealisasikan ide-ide yang disampaikan dalam bentuk teks-teks suci Al-Qur-an maupun yang diucapkannya sendiri. Cita-cita Nabi adalah kesetaraan umat manusia sejagat, persaudaraan tanpa kecuali, tegaknya keadilan, kebebasan, penghormatan manusia atas sesamanya, dan ketakwaan kepada Tuhan.

Itu semua adalah *makarim al akhlaq* atau yang lebih populer disebut *al akhlaq al karimah*. Ia adalah tempat semua keputusan berpijak. Keputusan apapun tidak boleh mereduksi atau bahkan mendistorsi ide-ide itu. Dan gerakan-gerakan kaum perempuan sekarang harus menuju ke sana.